

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PEKANBARU**

**EVALUASI TUGAS DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
INDRAGIRI HILIR DALAM PENGELOLAAN SAMPAH DI
KECAMATAN TEMBILAHAN**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu
Bidang Ilmu Sosial Program Studi Ilmu Pemerintahan
Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau



**MHD Iqbal Mandiri
NPM : 157310458**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
PEKANBARU**

2019



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

الجامعة الإسلامية الريوية

Alamat: Jalan Kaharuddin Nasution No. 113 Marpoyan, Pekanbaru, Riau, Indonesia 28284
Telp. +62761674674 Fax. +62761674834 Email: ftsipol@uir.ac.id Website: www.uir.ac.id

SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI SKRIPSI

Nomor : 750/A_UIR/5-FS/2019

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau menerangkan bahwa :

Nama : MHD Iqbal Mandiri
NPM : 157310458
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Judul Skripsi : Evaluasi Tugas Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Indragiri Hilir Dalam Pengelolaan Sampah Di Kecamatan Tembilahan
Persentase Plagiasi : 14%
Jumlah Halaman : 89 (Abstrak s/d Daftar Pustaka)
Status : Lulus

Adalah benar-benar sudah lulus pengecekan plagiasi dari Naskah Publikasi Skripsi, dengan menggunakan aplikasi Turnitin (terlampir).

Demikianlah surat keterangan ini di buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 01 November 2019

Homat Kami,
Wakil Dekan Bid. Akademik

Dr. H. Panca Setyo Prihatin, S.IP., M.Si
NPK. 160702589

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIPOL UIR
Nomor: 1116/UIR-Fs/Kpts/2018 Tentang:
PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA
DEKAN FISIPOL UIR

Menimbang : 1. Bahwa untuk mengarahkan mahasiswa dalam penulisan skripsi perlu difasilitatori oleh Dosen pembimbing;
2. Bahwa Dosen pembimbing dimaksud perlu ditetapkan dalam bentuk surat keputusan Dekan

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor: 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor: 60 tahun 1999 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. SK Mendiknas. No.045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi;
4. SK Rektor No.141/UIR/Kpts/2009 tentang Kurikulum Baru Fisipol UIR;
5. SK Rektor No. 112/UIR/KPTS/2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas dan Direktur Pascasarjana UIR masa bakti 2016-2020.

Memperhatikan: Rekomendasi Kajur. dan WD.I tentang usulan Dosen Pembimbing penulisan skripsi mahasiswa;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : 1. Dosen yang identitasnya tertera berikut ini:

I Nama : Prof. Dr. H. Yusri Munaf, SH., M.Hum
NIP/NPK : 131625385
Pangkat/Jabatan : IV/a – Guru Besar
Kedudukan : **Pembimbing I**

II Nama : Rizky Setiawan, S.IP., M.Si
NIP/NPK : 15DK0202036
Pangkat/Jabatan : III/b – Ass. Ahli
Kedudukan : **Pembimbing II**

Pada proses penulisan skripsi mahasiswa yang identitasnya tertera berikut ini:

Nama : **Mhd Iqbal Mandiri**
NPM : 157310458
Program Studi : Ilmu Pemerintahan. :
Judul Skripsi : Peranan Pemerintah Daerah Dan Keikutsertaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah Di Kota Tembilahan Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir.

2. Pembagian dan pelaksanaan tugas Pembimbing I dan Pembimbing II berpedoman kepada **SK Dekan No. 001/Fs-UIR/Kpts-PK/2010 tentang Pembagian Tugas Pembimbingan dan Perbaikan UP, Skripsi, dan Kertas Kerja Mahasiswa Fisipol UIR Pekanbaru;**
3. Kepada Dosen Pembimbing diberikan honorarium sesuai ketentuan yang berlaku di UIR;
4. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kesalahan di dalamnya segera diperbaiki sebagaimana seharusnya.

Kutipan : Surat keputusan ini disampaikan kepada Dosen bersangkutan untuk dilaksanakan secara baik dan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 06 Desember 2018

An. Dekan,

H. Pinca Setyo Prihatin, S.IP, M.Si.
Wakil Dekan / Bid. Akademik



Tembusan, disampaikan kepada:

1. Yth. Bapak Rektor UIR
2. Yth. Ketua Prodi IP
3. Yth. Ka. Labor IP
4. Arsip. --SK Pembimbing.

**EVALUATION OF ENVIRONMENTAL DEPARTMENT OF LIVING AND
INDIVIDUAL CLEANLINESS IN WASTE MANAGEMENT IN
TEMBILAHAN DISTRICT**

ABSTRACT

**BY :
MHD IQBAL MANDIRI**

Regional Regulation of Indragiri Hilir Regency Number 20 of 2011 concerning Waste Management in which the Office of the Environment and Cleanliness of Indragiri Hilir is obliged to carry out its tasks in waste management, while the achievement of achieving the duties of the Office of the Environment and Cleanliness of Indragiri Hilir include the Effectiveness, Efficiency, Adequacy, Smoothness, Responsiveness and Responsibility Accuracy. The purpose of this study was to determine the Implementation of the Tasks of the Environment and Hygiene Indragiri Hilir Office in Waste Management in Tembilahan District and to know the obstacles to the Implementation of the Tasks of the Environmental and Hygiene Indragiri Hilir Service in the Waste Management in Tembilahan District. The research method used is a quantitative combination of qualitative methods. The results of the implementation of the tasks of the Office of the Environment and Cleanliness of Indragiri Hilir in Waste Management in Tembilahan District through the six indicators are in the gori words "Fairly Implemented" with an average value of 24 with a percentage of 63%. It is known that the implementation of the duties of the Environment and Cleanliness Agency of Indragiri Hilir in Waste Management in Tembilahan Sub-district has not yet been implemented in terms of the transportation of garbage starting from the temporary garbage collection place to the temporary garbage collection place, there is no garbage bin improvement, and there is no cooperation with the community. resulting in a buildup of rubbish and rubbish littered out of place. But the authors suggest that the Office of the Environment and Hygiene Indragiri Hilir in Waste Management in accordance with their duties and functions as well as supervise in order not to occur littering, and set the time of transporting waste in accordance with the stipulations that have been established and collaborate with the community in waste management.

Keywords: *Evaluation, Task, Trash.*

**EVALUASI TUGAS DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
INDRAGIRI HILIR DALAM PENGELOLAAN SAMPAH DI
KECAMATAN TEMBILAHAN**

ABSTRAK

**OLEH :
MHD IQBAL MANDIRI**

Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 20 tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah dimana Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Indragiri Hilir berkewajiban didalam melaksanakan tugasnya didalam pengelolaan Sampah di Kecamatan Tembilahan, adapun pelaksanaan pencapaian Tugas Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Indragiri Hilir meliputi Efektivitas, Efisiensi, Kecukupan, Perataan, Responsivitas dan Ketepatan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Pelaksanaan Tugas Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Indragiri Hilir Dalam Pengelolaan Sampah Di Kecamatan Tembilahan serta mengetahui hambatan Pelaksanaan Tugas Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Indragiri Hilir Dalam Pengelolaan Sampah Di Kecamatan Tembilahan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penggabungan kuantitatif dengan kualitatif. Hasil penelitian Pelaksanaan Tugas Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Indragiri Hilir Dalam Pengelolaan Sampah Di Kecamatan Tembilahan melalui enam indikator berada pada kata gori “Cukup Terlaksana” dengan nilai rata-rata 24 dengan persentase 63%. Hal ini diketahui Pelaksanaan Tugas Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Indragiri Hilir Dalam Pengelolaan Sampah Di Kecamatan Tembilahan belum terlaksananya ketetapan waktu pengangkutan sampah mulai dari tempat penampungan sampah sementara sampai dengan tempat penampungan sampah sementara, belum adanya pembersihan tong sampah disetiap RT, serta belum adanya kerjasama yang solit dengan masyarakat sehingga menimbulkan penumpukan sampah dan sampah berserakan tidak pada tempatnya. Namun penulis menyarankan agar Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Indragiri Hilir Dalam Pengelolaan Sampah berdasarkan tugas dan fungsinya serta melakukan pengawasan di masyarakat agar tidak terjadinya pembuangan sampah dengan sembarangan, dan menetapkan waktu pengangkutan sampah sesuai dengan ketetapan yang telah ditetapkan dan melakukan kerjasama dengan masyarakat didalam penanganan sampah.

Kata Kunci : Evaluasi, Tugas, Sampah.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah dengan segala keterbatasan akhirnya karya ilmiah yang ditulis dalam bentuk usulan penelitian dapat penulis selesaikan. Usulan penelitian yang berjudul “Evaluasi Tugas Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Dalam Pengelolaan Sampah Di Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir.” ini penulis tulis dan diajukan ke fakultas dalam rangka memenuhi salah satu syarat menamatkan studi dan sekaligus memperoleh gelar sarjana strata satu pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.

Penulis dengan segala keterbatasan ilmu dan pengalaman sudah berupaya semaksimal mungkin untuk menyusun setiap lembaran bab perbab usulan penelitian ini sesuai dengan kaidah penelitian ilmiah dan ketentuan yang ditetapkan oleh fakultas. Walaupun demikian penulis menyadari bahwa pada lembar tertentu dari naskah usulan penelitian ini mungkin ditemukan berbagai kesalahan dan kekurangan. Untuk membenahi hal itu penulis berharap kemakluman serta masukan dari para pembaca.

Penulis menyadari pula bahwa dalam proses studi maupun dalam proses penulisan dan penyelesaian usulan penelitian ini banyak pihak turut membantu. Sehubungan dengan itu secara khusus pada lembaran ini penulis mengucapkan salud dan terimakasih kepada :

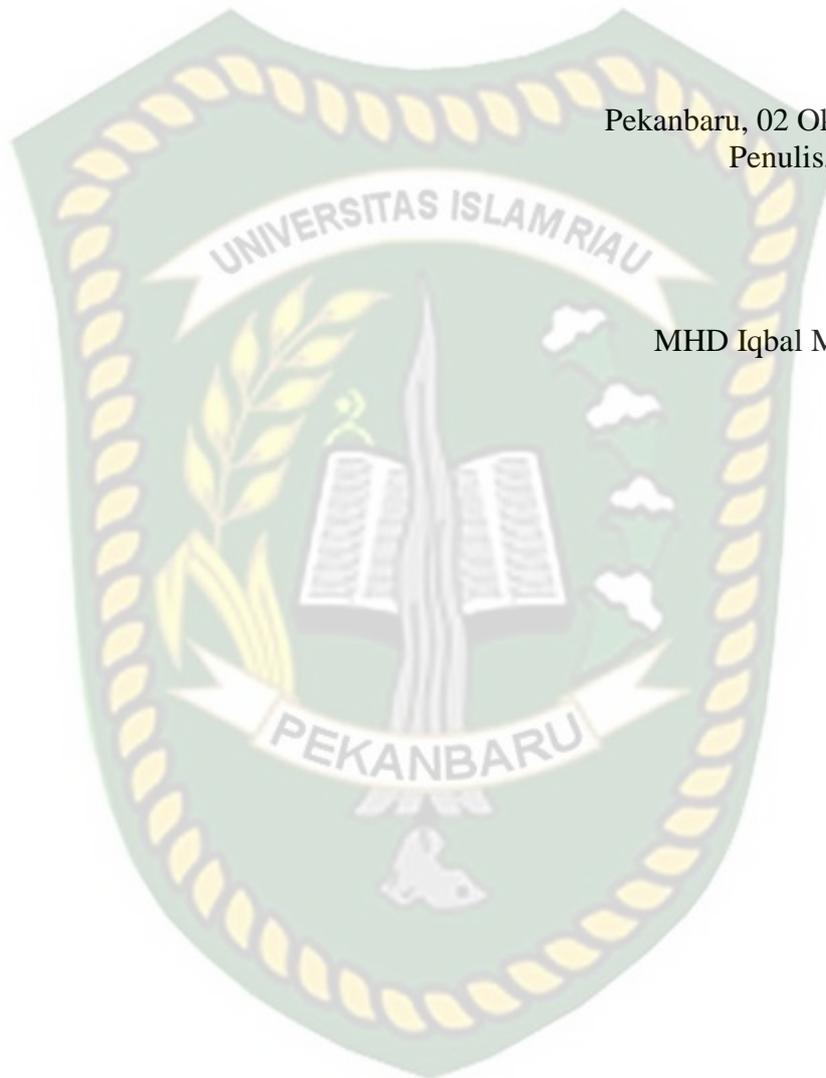
1. Rektor Universitas Islam Bapak Riau Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH., M.CL. yang menyediakan fasilitas dan memberikan kesempatan kepada penulis dalam menimbah ilmu pada lembaga pendidikan yang beliau pimpin.

2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Bapak Dr. H. Moris Adidi Yogia, M.Si yang menyediakan fasilitas dan memberikan kesempatan kepada penulis dalam menimba ilmu pada fakultas Ilmu Sosial dan Politik Ilmu Pemerintahan.
3. Ketua Program Studi Bapak Budi Muliato, S.IP., M.Si. selaku yang telah memfasilitasi dan ilmu pengetahuan sehingga telah memperluas wawasan dan sangat membantu penulis dalam melakukan penelitian ini.
4. Bapak Prof. Dr. H. Yusri Munaf, S.H. M. Hum. selaku dosen Pembimbing I yang telah menyediakan waktu dan membentuk ilmu pengetahuan kepada penulis terutama selama proses bimbingan berlangsung.
5. Bapak Rizky Setiawan S.IP, M.Si. selaku dosen Pembimbing II yang telah menyediakan waktu dan menularkan pengetahuan kepada penulis terutama selama proses bimbingan berlangsung.
6. Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan Ilmu Pengetahuan selama penulis menimba Ilmu di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
7. Karyawan, Pegawai dan Tata Usaha yang selalu mengarahkan penulis dalam melengkapai kelengkapan prosedur melakukan penelitian.
8. Orang tua, yang telah memberikan semangat dan motivis penulis agar penulis dapat menyelesaikan penelitian.
9. Rekan-rekan seperjuangan Ilmu Pemerintahan angkatan 2015 yang telah membantu dan memberikan semangat agar penulis dapat menyelesaikan penelitian ini.

Penulis bermohon kepada Yang Maha Kuasa semoga jasa baik beliau itu dibalas dengan rahmat dan karunia yang setimpal, Akhirnya penulis berharap semoga usulan penelitian ini dapat memberikan manfaat yang cukup berarti kepada setiap para pembacanya.

Pekanbaru, 02 Oktober 2019
Penulis,

MHD Iqbal Mandiri



DAFTAR ISI

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH.....	xiii
ABSTRAK	xiv
ABSTRACT.....	xv
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
1. Tujuan Penelitian.....	9
2. Kegunaan Penelitian.....	10
BAB II : KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN	
A. Kajian Pustaka	11
1. Konsep Pemerintahan.....	11
2. Asas Dekonsentrasi dan Asas Tugas Pembantuan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan.....	15
3. Konsep Pelimpahan Kewenangan	23
4. Konsep kebijakan	25
5. Konsep Evaluasi	29
6. Konsep Pengawasan	33
7. Konsep Pengelolaan	36
B. Penelitian Terdahulu	39
C. Kerangka Pikiran	42
D. Konsep Operasional	42

E. Operasional Variabel.....	44
F. Teknik Pengukuran	47

BAB III : METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian.....	49
B. Lokasi Penelitian	49
C. Populasi dan Sampel Penelitian.....	50
D. Teknik Penarikan Sampel.....	51
E. Jenis dan Sumber Data	51
F. Teknik Pengumpulan Data	52
G. Teknik Analisis Data.....	53
H. Jadwal Pelaksanaan Penelitian.....	53

BAB IV : DISKRIPSI LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Singkat Kabupaten Indragiri Hilir.....	54
B. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Indragiri Hilir	55

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Identitas Responden	58
1. Identitas Responden.....	58
B. Evaluasi Tugas Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Indragiri Hilir Dalam Pengelolaan Sampah Di Kecamatan Tembilahan	60
1. Efektivitas	62
2. Efisiensi.....	68
3. Kecukupan	73
4. Perataan.....	79
5. Responsivitas	85
6. Ketepatan	90
C. Hambatan Dalam Pelaksanaan Tugas Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Indragiri Hilir Dalam Pengelolaan Sampah Di Kecamatan Tembilahan	98

BAB VI : PENUTUP

A. Kesimpulan 101
B. Saran 103

DAFTAR KEPUSTAKAAN 105

DAFTAR LAMPIRAN 108



Dokumen ini adalah Arsip Milik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

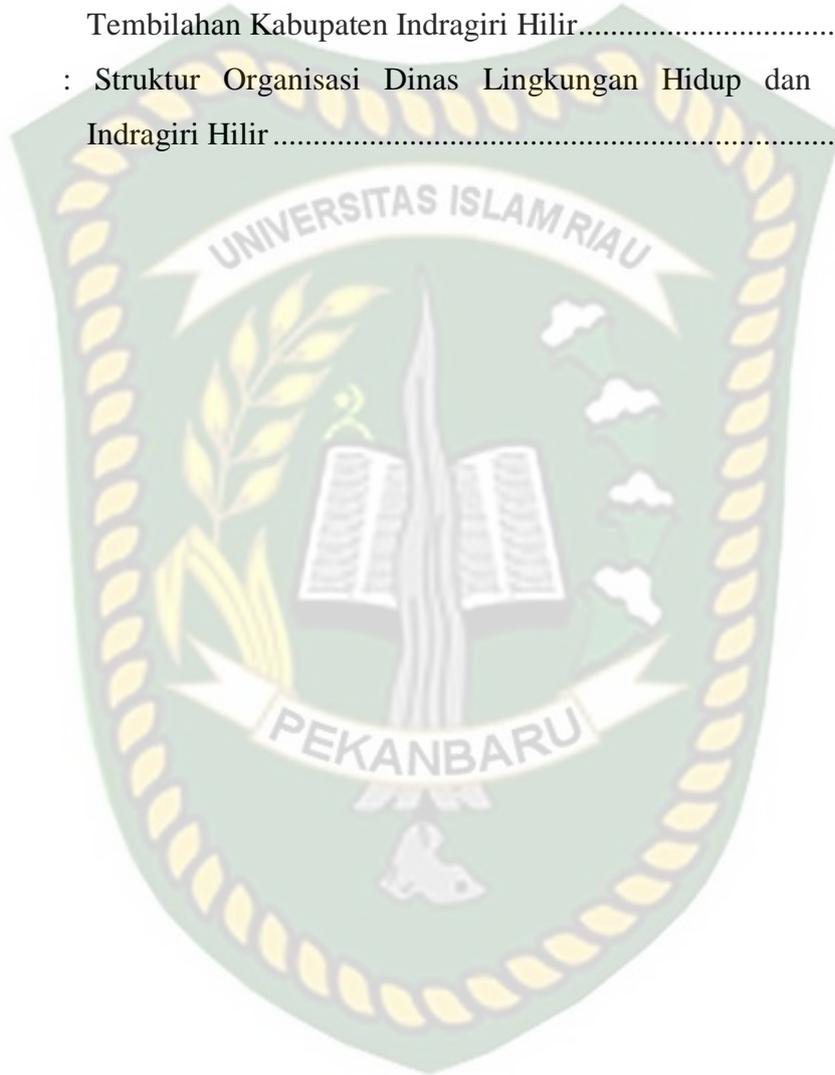
DAFTAR TABEL

Tabel :	Halaman
I.1 Jumlah Timbunan Sampah Kabupaten Indragiri Hilir Per Kecamatan Tahun 2018.	5
I.2 Jadwal Kegiatan Penyuluhan Kebersihan Di Kecamatan Tembilahan.....	7
II.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Ini Dengan Penelitian Terdahulu	40
II.2 Operasional Variabel penelitian tentang Evaluasi Tugas Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan dalam Pengelolaan Sampah Di Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir	44
III.1 Jumlah Populasi dan Sampel Daerah Penelitian.....	50
III.2 Jadwal Pelaksanaan Penelitian.....	56
V.1 Klasifikasi Responden Penelitian Berdasarkan Jenis Kelamin.....	59
V.2 Klasifikasi Responden Penelitian Berdasarkan Umur	59
V.3 Klasifikasi Responden Penelitian Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	60
V.4 Penilaian Jawaban Responden Mengenai Indikator Efektivitas dalam pelaksanaan Tugas Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Indragiri Hilir dalam Pengelolaan Sampah di Kecamatan Tembilahan	63
V.5 Penilaian Jawaban Responden Mengenai Indikator Efisiensi Dalam Pelaksanaan Tugas Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Indragiri Hilir Dalam Pengelolaan Sampah Di Kecamatan Tembilahan.	68
V.6 Penilaian Jawaban Responden Mengenai Indikator Kecukupan Dalam Pelaksanaan Tugas Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Indragiri Hilir Dalam Pengelolaan Sampah Di Kecamatan Tembilahan	74

V.7	Penilaian Jawaban Responden Mengenai Indikator Perataan Dalam Pelaksanaan Tugas Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Indragiri Hilir Dalam Pengelolaan Sampah Di Kecamatan Tembilahan	80
V.8	Penilaian Jawaban Responden Mengenai Indikator Responsibitas Dalam Pelaksanaan Tugas Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Indragiri Hilir Dalam Pengelolaan Sampah Di Kecamatan Tembilahan	86
V.9	Penilaian Jawaban Responden Mengenai Indikator Ketepatan Dalam Pelaksanaan Tugas Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Indragiri Hilir Dalam Pengelolaan Sampah Di Kecamatan Tembilahan	91
V.10	Rekapitulasi Jawaban Responden Tentang Evaluasi Pelaksanaan Tugas Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Indragiri Hilir Dalam Pengelolaan Sampah Di Kecamatan Tembilahan.....	95

DAFTAR GAMBAR

Gambar :	Halaman
II. 1 : Kerangka pikiran tentang Evaluasi Tugas Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan dalam Pengelolaan Sampah Di Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir.....	42
IV. 1 : Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Indragiri Hilir	55



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran :	Halaman
1. Daftar Kusioner Penelitian Tentang Evaluasi Tugas Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Indragiri Hilir Dalam Pengelolaan Sampah Di Kecamatan Tembilahan.....	108
2. Daftar Wawancara Penelitian Tentang Evaluasi Tugas Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Indragiri Hilir Dalam Pengelolaan Sampah Di Kecamatan Tembilahan.....	114
3. Hasil Rekapitulasi Telly Jawaban Responden Tentang Evaluasi Tugas Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Indragiri Hilir Dalam Pengelolaan Sampah Di Kecamatan Tembilahan.....	117
4. Foto-Foto Dokumentasi Hasil Penelitian Observasi Tentang Evaluasi Tugas Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Indragiri Hilir Dalam Pengelolaan Sampah Di Kecamatan Tembilahan.....	119

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tujuan Negara Indonesia adalah seperti yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat yaitu: melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta melaksanakan ketertiban dunia berdasar kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Tujuan utama dibentuknya pemerintah adalah untuk menjaga suatu system ketertiban masyarakat dalam menjalani kehidupan secara wajar. Sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut Undang-undang Dasar 1945 memberi keluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Dalam menyelenggarakan otonomi daerah, dipandang perlu untuk lebih menekankan pada prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta memperhatikan potensi dan keaneka ragaman daerah. Oleh karena penyelenggara otonomi daerah adalah dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab secara proposional.

Dalam menyeleggarakan pemerintahan di negara Republik Indonesia, negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dibagi atas daerah-daerah. Sebagaimana didapat dalam penjelasan UUD 1945 Pasal (18) Ayat (1) Yaitu

Negara kesatuan Republik Indonesia diabagi atas daerah-daerah berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal (18) Ayat (1) Yaitu Negara kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah Provinsi dan daerah

Provinsi itu terbagi atas Kabupaten dan Kota, yang tiap-tiap Provinsi, Kabupaten dan Kota.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah dimana diaktakan pada pasal 12 disebutkan bahwa Urusan Pemerintahan Wajib pemerintah yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud antara lain adalah Lingkungan hidup. Lingkungan hidup adalah salah satu penyelenggaraan desentralisasi di daerah oleh Organisasi Perangkat daerah didalam penyelenggaraan pemerintah Daerah.

Sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang diatas, pemerintah daerah kabupaten/kota menjalankan kewenangannya tersebut dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah daerah Kabupaten/Kota menjalankan kewenangan dibantu oleh organisasi perangkat daerah diperlukan untuk dapat membantu pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah kabupaten/kota, disamping itu juga diperlukan adanya peran serta dan dukungan organisasi atau lembaga sosial kemasyarakatan.

Kecamatan Tembilahan merupakan sebuah kecamatan yang berada di Kabupaten Indragiri Hilir, Kecamatan Tembilahan memiliki luas wilayah 197,37 km² dengan jumlah penduduk 69.498 Jiwa. Keasrian Kecamatan Tembilahan tidak terlepas dari tindak kebijakan Pemerintah Setempat terutama didalam menanggulangi sampah, sampah adalah sisa kegiatan sehari hari manusia dan atau proses alam yang terbentuk padat, dengan jumlah penduduk 69.498 Jiwa serta perkembangan zaman yang membuat pola hidup serta perkembangan

masyarakat semakin meningkat, maka jumlah pengguna barang semakin bertambah dan secara tidak langsung barang yang digunakan oleh masyarakat berdampak pada meningkatnya volume, jenis dan karakteristik sampah yang dihasilkan oleh masyarakat tersebut.

Meningkat produktifitas sampah yang dihasilkan setiap harinya dapat berakibat pada penumpukan sampah apabila pemerintah lambat dalam mengantisipasi, jumlah sampah yang dihasilkan oleh masyarakat setiap hari haruslah dapat ditampung oleh tempat penampungan sementara (TPS) dan mobil pengangkut sampah. Karena apabila TPS yang tersedia tidak memadai dan mobil sampah tidak dapat mengangkut semua yang ada tentunya akan ada sampah yang tersisa dan tidak terangkut dan akan terus bertambah setiap harinya. Apabila hal ini dibiarkan terus menerus tentu saja dapat berdampak pada masalah kesehatan dan merusakkan lingkungan.

Salah satu upaya yang dapat dilakukan pemerintah dalam menanggulangi penumpukan sampah adalah dengan pengelolaan sampah. Yang mana pengelolaan sampah ini adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Pengurangan dan penanganan disini meliputi kegiatan pembatasan timbunan sampah, pendauran ulang sampah hingga pemanfaatan kembali sampah. Sedangkan penanganan sampah meliputi kegiatan pemilihan, pengumpulan, pengangkutan dan pengolahan hingga pemrosesan akhir sampah.

Dalam memaksimalkan pelaksanaan pengelolaan sampah di Kabupaten Indragiri Hilir secara komprehensif, pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir

menetapkan suatu Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 20 tahun 2011 tentang pengelolaan sampah. Sehingga, pemerintah daerah beserta dinas terkait diharapkan mampu untuk melakukan penanganan dan pengelolaan terhadap sampah-sampah di Kabupaten Indragiri Hilir khususnya di Kecamatan Tembilahan yang sebagian besar dihasilkan oleh masyarakat baik individu maupun kelompok. Sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 20 tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah pasal 5 Tentang Pengelolaan Sampah, yang didalamnya disebutkan tugas dan wewenang pemerintah dalam pengelolaan sampah antara lain “Melaksanakan pengelolaan sampah dan memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah”.

Kemudian pada pasal 3 didalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa tujuan dari pengelolaan sampah tersebut yaitu: “Meningkatkan peran aktif masyarakat dan pelaku usaha dalam pengelolaan sampah di daerah”.

Dalam menjalankan pengelolaan sampah, pelaksanaannya dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Indragiri Hilir sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 71 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Indragiri Hilir, adapun Bidang pokok didalam pengeloaan Sampah terletak pada bidan Bidang Pengelolaan Sampah, dengan membawahi :

1. Seksi Pengurangan dan Pemanfaatan Sampah.
2. Seksi Penanganan dan Pemrosesan Akhir Sampah.
3. Seksi Sarana dan Prasarana.

Berdasarkan penjelasan diatas bahwa urusan pengelolaan sampah diKabupaten Indragiri Hilir diselenggarakan oleh Bidang Pengelolaan Sampah sebagaimana dijelaskan dalam pasal 15 ayat (2) yang berbunyi :

- a. Pelaksanaan penetapan lokasi Tempat Penampungan Sementara (TPS), Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) dan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah;
- b. Pelaksanaan kerja sama dengan kabupaten/kota lain dan kemitraan dengan badan usaha pengelolaan sampah dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah;

Dari peraturan diatas tentang tugas dan kewenangan pada pasal 5 dapat di simpulkan, kegiatan pengelolaan sampah yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir bersama Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Indragiri Hilir berupa pengurangan sampah, penanganan sampah dan meningkatkan peran aktif masyarakat.

Dalam hal pengurangan sampah di jelaskan dalam pasal 14 salah satu kegiatannya yaitu dengan melakukan pembatasan timbulan sampah, adapun jumlah volume timbunan sampah yang terdapat diKabupaten Indragiri Hilir berdasarkan pembagian per Kecamatan pada tahun 2018 terdapat pada tabel berikut ini:

Tabel I. 1: Jumlah Timbunan Sampah Kabupaten Indragiri Hilir Per Kecamatan Tahun 2018

No	Kecamatan	Jumlah Sampah
1	Tampuling	157, 48 Ton
2	Tembilahan	301, 56 Ton
3	Gaung Anak Serka	151,21Ton
4	Mandah	134,63Ton
5	Sail	54,48Ton
6	Lima Puluh	387,55Ton
7	Kateman	144,99 Ton
8	Kuala Indragiri	228,3Ton

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Indragiri Hilir, 2019

Berdasarkan data diatas Jumlah Timbunan Sampah Kabupaten Indragiri Hilir Per Kecamatan Tahun 2018 dapat dilihat bahwa kecamatan Tembilahan termasuk jumlah sampah yang paling banyak yaitu menghasilkan jumlah sampah 301,56 Ton, sedangkan yang paling sedikit Gaung Anak Serka, Kecamatan Tembilahan termasuk jumlah penduduk yang padat sehingga banyak sampah yang harus ditangan oleh Pemerintah Kabupaten, sehingga apabila pemerintah lambat dalam mengatasi jumlah sampah akan terdapat sampah yang berserakan yang berdampak pada kesehatan masyarakat.

Penanganan sampah dijelaskan di pasal 15 yang salah satunya berbunyi penanganan sampah meliputi pengumpulan sampah, dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengelolaan sampah terpadu tapi faktanya masih di temui tumpukan-tumpukan sampah yang tidak ada penanganan,yang berakibatkan tumpukan sampah liar yang terdapat di sejumlah titik seperti di tempat keramaian rumah penduduk.

Kemudian untuk kegiatan peningkatan partisipasi masyarakat Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Indragiri Hilir melakukan sosialisasi sebagaimana yang berbunyi dalam pasal 37 ayat 2 bahwa adanya kegiatan sosialisasi guna imbauan dan pemberitahuan penangan sampah secara bersama. Adapun dapat dilihat table dibawah ini jadwal kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Indragiri Hilir yaitu:

Tabel 1.2 : Jadwal Kegiatan Penyuluhan Kebersihan Di Kecamatan Tembilahan

NO	Desa/ Kelurahan	Hari/ Tanggal	Pukul
1	Seberang Tembilahan	Senin/ 9 Juli 2018	09.00 WIB
2	Sungai Perak	Selasa/ 10 Juli 2018	09.00 WIB
3	Tembilahan Hilir	Rabu/ 11 Juli 2018	09.00 WIB
4	Tembilahan Kota	Kamis/ 12 Juli 2018	09.00 WIB
5	Pekan Arba	Senin/ 16 Juli 2018	09.00 WIB
6	Sungai Beringin	Selasa/ 17 Juli 2018	09.00 WIB

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Indragiri Hilir, 2019

Dari tabel diatas Jadwal Kegiatan Penyuluhan Kebersihan Di Kecamatan Tembilahan Dengan adanya kegiatan penyuluhan kebersihan ini agar masyarakat berpean aktif dalam menjaga lingkungan terutama dalam membuang sampah pada jam yang telah ditentukan di TPS yang telah disediakan.

Berdasarkan uraian diatas masih ditemukan fenomena-fenomena yang dapat mendukung untuk diadakan suatu penelitian. Adapun fenomena-fenomena tersebut antara lain adalah sebaga berikut:

1. Diketahui efektivitas pencapaian tugas Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Indragiri Hilir didalam penanganan sampah belummelakukan penyediaan tempat penampungan sampah di setiap RT/RW sehingga menyebabkan sampah berserakan dibuang tidak pada tempatnya.
2. Diketahui masih kurangnya jumlah armada yang melakukan pengangkutan sampah dimana armada sebanyak 2 buah melainkan kenyataannya yang beroperasi sebanyak 1 armada sehingga kurang maksimalnya didalam pengakutan sampah
3. Diketahui belum terlaksananya penetapan peraturan didalam pengelolaan sampah yang didasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir

Nomor 20 tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah dimana dikatakan pada pasal 3 dijelaskan tujuan dari pengelolaan sampah antara lain Mewujudkan lingkungan yang sehat dan bersih.

4. Diketahui belum adanya ketetapan waktu penanganan sampah melainkan dilakukan 3 kali dalam seminggu sehingga menimbulkan penumpukan sampah.
5. Diketahui adanya pengawasan dan sanksi tegas yang dilakukan Dinas terkait pembuangan sampah dengan sembarangan sehingga terlihat sampah masih dibuang tidak pada tempatnya dan cenderung dibuang di selokan sehingga mengalami sumbatan sementara di kecamatan tembilahan rata-rata dikelilingi lokasi rawa-rawa.

Berdasarkan pemaparan diatas dan fenomena yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan upah minimum maka pada kesempatan ini penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul **“Evaluasi Tugas Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan dalam Pengelolaan Sampah Di Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir”**

B. Perumusan Masalah

Dari sejumlah fenomena sebagaimana digambarkan dalam latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian yaitu:”Bagaimana Evaluasi Tugas Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan dalam Pengelolaan Sampah Di Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dikemukakan maka tujuan penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui Evaluasi Tugas Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan dalam Pengelolaan Sampah Di Kecamatan Tembilihan Kabupaten Indragiri Hilir
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat dalam Tugas Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan dalam Pengelolaan Sampah Di Kecamatan Tembilihan Kabupaten Indragiri Hilir.

2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat ganda, yaitu manfaat teoritis/akademis maupun manfaat praktis.

- a. Manfaat Teoritis

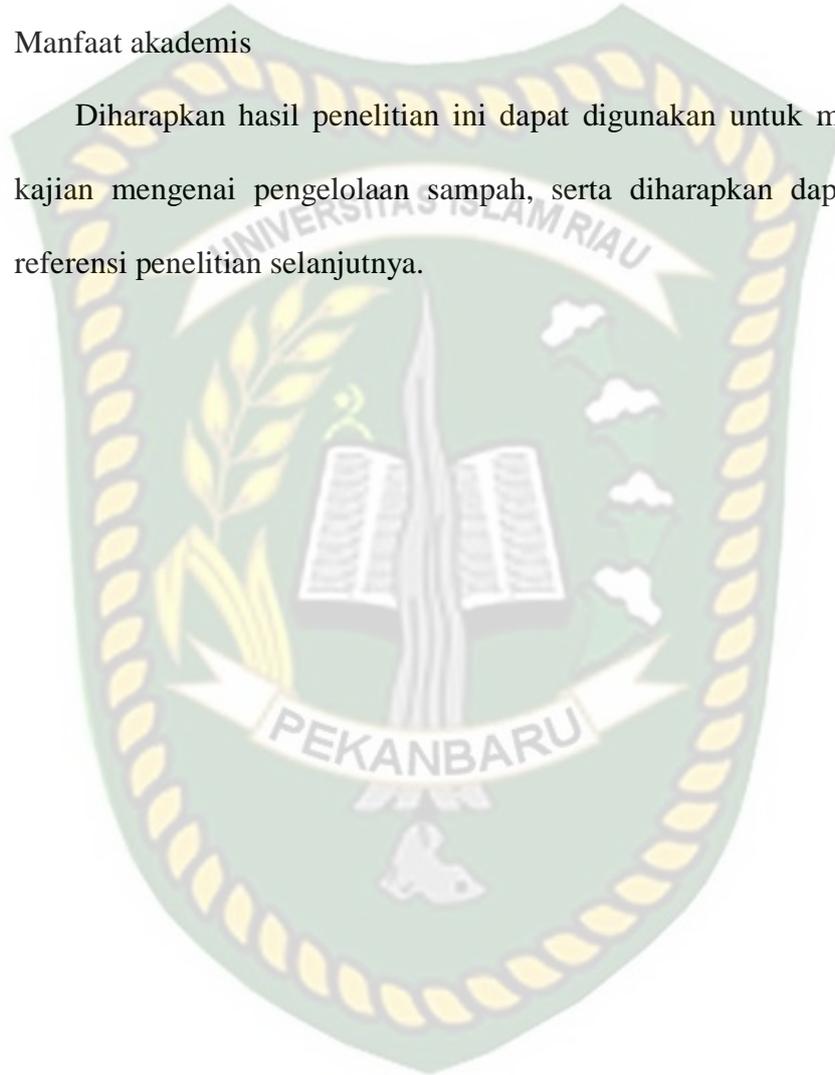
Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat khususnya bagi pengembangan ilmu pemerintahan di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Islam Riau sebagai sumber informasi yang dapat memberikan informasi teoritis dan empiris pada pihak-pihak yang akan melakukan penelitian lebih lanjut mengenai permasalahan ini dan menambah sumber pustaka yang telah ada.

b. Manfaat Peraktis

Sebagai bahan masukan bagi pemerintah dan pihak terkait tentang pentingnya upaya menjaga lingkungan dari sampah yang dapat menyebabkan pencemaran dan kerusakan lingkungan.

c. Manfaat akademis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan untuk memperkaya kajian mengenai pengelolaan sampah, serta diharapkan dapat menjadi referensi penelitian selanjutnya.



BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIRAN

A. Studi kepustakaan

Sebagai pedoman dan acuan dalam memecahkan pokok permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini penulis akan memaparkan konsep-konsep atau teori-teori yang ada relevansinya untuk mendukung pemecahan masalah yang dikemukakan diatas.

1. Konsep pemerintahan

Menurut Ndraha (2011:6) pemerintah adalah organisasi yang berwenang memproses pelayanan publik dan berkewajiban memproses pelayanan sipil bagi setiap orang melalui hubungan pemerintahan, sehingga setiap anggota masyarakat yang bersangkutan menerimanya pada saat diperlukan, sesuai dengan tuntutan (harapan) yang diperintah. Dalam hubungan ini, bahkan warga negara asing atau siapa saja yang pada suatu saat berada secara sah (legal) di wilayah Indonesia, berhak menerima layanan sipil tertentu, dan pemerintah wajib melayaninya.

Secara umum pemerintah dapat didefinisikan sebagai organisasi yang memiliki kekuasaan untuk membuat dan menerapkan hukum secara undang – undang di wilayah tertentu. Pemerintah merupakan sebuah organisasi yang memiliki:

1. Otoritas yang memerintah dari suatu unit politik
2. Kekuasaan yang memerintah suatu masyarakat politik (political will)

3. Aparatur yang merupakan badan pemerintah yang berfungsi dan menjalankan kekuasaan.
4. Kekuasaan untuk membuat peraturan prundang – undangan untuk menangani perselisihan dan membicarakan putusan administrasi dan dengan monopoli atas kekuasaan yang sah.

Adapun tugas pemerintah menurut Rasyid (1996: 37-38) menegaskan bahwa Tugas pokok pemerintahan yang sudah dirincikan mencakupi tujuh bidang pelayanan didalam tulisannya, dapat diringkas menjadi empat fungsi yang hakiki, yaitu : pelayanan (service), pemberdayaan (empowerment), pembangunan (development) dan pembinaan (directing). Inilah yang sekaligus menjadi misi pemerintahan ditengah – tengah masyarakat.

Pemerintahan berasal dari kata “perintah” yang setelah ditambah awalan “pe” menjadi pemerintah, dan ketika ditambah akhiran “an” menjadi pemerintahan, dalam hal ini beda antara “pemerintah” dengan “pemerintahan” adalah karena pemerintah merupakan badan atau organisasi yang bersangkutan, sedangkan pemerintahan berarti perihal ataupun hal ikhwal pemerintahan itu sendiri (Syafiie, 2011:4).

Menurut Ndraha (2002:10) ilmu pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana memenuhi dan melindungi kebutuhan dan tuntutan tiap orang akan jasa publik dan layanan civil dalam hubungan pemerintahan (sehingga diterima) pada saat dibutuhkan oleh yang bersangkutan.

Menurut musanef (dalam Syafiie 2011:7) menyebutkan bahwa ilmu pemerintahan adalah suatu ilmu yang dapat menguasai dan memimpin serta

menyelidiki unsur – unsur dinas, berhubungan dengan keserasian kedalam dan hubungan antara dinas – dinas itu dengan masyarakat yang kepentingannya diwakili oleh dinas itu.

Menurut Soemandar (dalam Syafii, 2011:8) mengatakan bahwa pemerintahan sebagai badan yang penting dalam rangka pemerintahannya, pemerintahan musti memperlihatkan pula ketentraman dan ketertiban umum, tuntutan dan harapan serta pendapat rakyat, kebutuhan dan kepentingan masyarakat, pengaruh – pengaruh lingkungan, pengaturan – pengaturan, komunikasi peran serta seluruh lapisan masyarakat dan legitimasi.

Sedangkan pemerintahan adalah segala daya upaya suatu Negara atau wilayah untuk mencapai tujuannya penyelenggaraan pemerintahan yang bertujuan bagi pelaksanaan pembangunan dan pemerintah diharapkan dapat terlaksana dengan kualitas dan kemampuan dari penyelenggara tersebut, selain pelaksanaan tugas pemerintah umum yang telah ada maka pemerintahan kecamatan juga melaksanakan tugas umum pemerintahannya yang merupakan sebagai pendukung dari tugas pemerintahan umum yang ada (Musaneff, 1997:15)

Kemudian fungsi utama pemerintah dalam mengembangkan tugas dan tanggung jawabnya ditentukan oleh beberapa factor antara lain (Rasyid 1997:96):

1. Tingkat efektifitas dan efisiensi yang dapat dicapai dalam organisasi yang membawakan peranan-peranan yang disepakati, ini berkenaan dengan cara mengkoordinasikan kebijakan-kebijakan yang telah dibangun dengan baik, baik secara manajerial maupun personal.

2. Program-program pengelolaan yang mencakup pengambilan keputusan secara umum berkenaan dengan mendefinisikan masalah yang dihadapi serta perutusan jalan keluar yang layak atas masalah itu.

Menurut Munaf (2015; 47) pemerintahan dimaknai sebagai suatu proses menata kelola kehidupan masyarakat dalam suatu pemerintahan/ Negara.

Menurut Robert Mac Iver (dalam Yusri Munaf 2015; 47) bentuk-bentuk pemerintahan mengemukakan bahwa ikhtisar format pemerintahan yang berbasis pada kontitusi oligarki dan pemerintahan yang pada konstitusi demokrasi yaitu :

1. Bentuk pemerintahan berbasis pada konstitusi oligarki adalah pemerintah yang bersifat monarkis (monarchy), pemerintahan yang bersifat diktatoris (Distatorship), pemerintahan yang bersifat teokratis, dan pemerintahan yang bersifat pluraristik (Plural headship).
2. Bentuk pemerintahan yang berbasis pada konstitusi oligarki adalah konstitsi demokrasi (Democracy) adalah system pemrintahan monarkis dengan kekuasaan yang terbatas dan system pemerintahan dengan pola republik. Dalam perkembangannya, system pemerintahan dengan pola republik semakin memperkuat bentuk pemerintahan yang demokratis. Pada dasarnya bentuk-bentuk pemerintahan demokrasi adalah limited monarcy kemudian berkembang menjadi pemerintahan republik.

Bentuk pemerintahan pada dasarnya menyatakan struktur organisasi dan fungsi pemerintahan. Kopstein dan lichbach (dalam Yusri Munaf, 2015; 48) mengatakan banwa bentuk pemerintahan suatu istilah yang digunakan untuk merujuk pada rangkaian institusi politik yang digunakan untuk

mengorganisasikan suatu Negara untuk menegaskan kekuasaannya atas suatu komunikasi politik.

Berdasarkan teori diatas bahwa pemerintah baik pusat maupun daerah mempunyai fungsi utama dalam negoisasi dan menggali berbagai kepentingan warga Negara dan berbagai kelompok komunitas yang ada dalam memberikan pelayanan, baik pelayanan perorangan maupun pelayanan publik, pembagunan fasilitas ekonomi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan memberi perlindungan kepada masyarakat

2. Asas Dekonsentrasi dan Asas Tugas Pembantuan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan

Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan dikatakan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam penyelenggaraan pemerintahannya menganut asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Dekonsentrasi dan tugas pembantuan diselenggarakan karena tidak semua wewenang dan tugas pemerintah dapat dilakukan dengan menggunakan asas desentralisasi. Disamping itu, sebagai konsekuensi negara kesatuan memang tidak dimungkinkan semua wewenang pemerintah didesentralisasikan dan diotonomkan sekalipun kepada daerah.

Pelaksanaan asas dekonsentrasi diletakkan pada wilayah provinsi dalam kedudukannya sebagai wilayah administrasi untuk melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan kepada gubernur sebagai wakil pemerintah di wilayah provinsi. Gubernur sebagai kepala daerah provinsi berfungsi pula selaku

wakil Pemerintah di daerah, dalam pengertian untuk menjembatani dan memperpendek rentang kendali pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah termasuk dalam pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah kabupaten dan kota. Dasar pertimbangan dan tujuan diselenggarakannya asas dekonsentrasi yaitu:

- a. terpeliharanya keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. terwujudnya pelaksanaan kebijakan nasional dalam mengurangi kesenjangan antar daerah;
- c. terwujudnya keserasian hubungan antar susunan pemerintahan dan antarpemerintahan di daerah;
- d. teridentifikasinya potensi dan terpeliharanya keanekaragaman sosial budaya daerah;
- e. tercapainya efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan, serta pengelolaan pembangunan dan pelayanan terhadap kepentingan umum masyarakat; dan
- f. terciptanya komunikasi sosial kemasyarakatan dan sosial budaya dalam system administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Penyelenggaraan asas tugas pembantuan adalah cerminan dari sistem dan prosedur penugasan Pemerintah kepada daerah dan/atau desa, dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa, serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pembangunan yang disertai dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkannya kepada yang memberi penugasan. Tugas pembantuan diselenggarakan karena tidak semua wewenang dan tugas pemerintahan dapat dilakukan dengan menggunakan asas desentralisasi dan asas dekonsentrasi. Pemberian tugas pembantuan dimaksudkan untuk meningkatkan

efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelayanan umum. Tujuan pemberian tugas pembantuan adalah memperlancar pelaksanaan tugas dan penyelesaian permasalahan, serta membantu penyelenggaraan pemerintahan, dan pengembangan pembangunan bagi daerah dan desa.

Tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah kepada daerah dan/atau desa meliputi sebagian tugas-tugas Pemerintah yang apabila dilaksanakan oleh daerah dan/atau desa akan lebih efisien dan efektif. Tugas pembantuan yang diberikan oleh pemerintah provinsi sebagai daerah otonom kepada kabupaten/kota dan/atau desa meliputi sebagian tugas-tugas provinsi, antara lain dalam bidang pemerintahan yang bersifat lintas kabupaten dan kota, serta sebagian tugas pemerintahan dalam bidang tertentu lainnya, termasuk juga sebagian tugas pemerintahan yang tidak atau belum dapat dilaksanakan oleh kabupaten dan kota.

Tugas pembantuan yang diberikan oleh pemerintah kabupaten/kota kepada desa mencakup sebagian tugas-tugas kabupaten/kota di bidang pemerintahan yang menjadi wewenang kabupaten/kota. Penyelenggaraan ketiga asas sebagaimana diuraikan tersebut di atas memberikan konsekuensi terhadap pengaturan pendanaan. Semua urusan pemerintahan yang sudah diserahkan menjadi kewenangan pemerintah daerah harus didanai dari APBD, sedangkan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah harus didanai dari APBN melalui bagian anggaran kementerian/lembaga. Pengaturan pendanaan kewenangan Pemerintah melalui APBN mencakup pendanaan sebagian

urusan pemerintahan yang akan dilimpahkan kepada gubernur berdasarkan asas dekonsentrasi, dan sebagian urusan pemerintahan yang akan ditugaskan kepada daerah provinsi dan kabupaten/kota berdasarkan asas tugas pembantuan.

Hal ini sejalan dengan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa perimbangan keuangan antara Pemerintah dan pemerintahan daerah merupakan suatu sistem yang menyeluruh dalam rangka pendanaan atas penyelenggaraan asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan.

Sejalan dengan hal itu, maka penyerahan wewenang pemerintahan, pelimpahan wewenang pemerintah, dan penugasan, dan tugas pembantu juga harus diikuti dengan pengaturan pendanaan dan pemanfaatan sumber daya nasional secara efisien dan efektif.

Berdasarkan pokok-pokok pemikiran sebagaimana yang diuraikan di atas, maka penyelenggaraan dan pengelolaan dana dekonsentrasi dan dana tugas pembantuan menjadi sangat penting untuk diberikan pengaturan secara lebih mendasar dan komprehensif. Berikut akan dijabarkan lebih lanjut berkenaan dengan dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

Ruang lingkup dekonsentrasi dan tugas pembantuan mencakup aspek penyelenggaraan, pengelolaan dana, pertanggungjawaban dan pelaporan, pembinaan dan pengawasan, pemeriksaan, serta sanksi. Penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pembantuan dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (PP 7/2008), meliputi:

- a. Pelimpahan urusan pemerintahan;
- b. Tata cara pelimpahan;
- c. Tata cara penyelenggaraan; dan
- d. Tata cara penarikan pelimpahan.

Pengelolaan dana dekonsentrasi dalam Pasal 8 PP 7/2008 meliputi:

- 1) Prinsip pendanaan;
- 2) Perencanaan dan penganggaran;
- 3) Penyaluran dan pelaksanaan; dan
- 4) Pengelolaan barang milik negara hasil pelaksanaan dekonsentrasi.

Pertanggungjawaban dan pelaporan dekonsentrasi dalam Pasal 8 PP 7/2008 meliputi:

- a. Penyelenggaraan dekonsentrasi; dan
- b. Pengelolaan dana dekonsentrasi.

Penyelenggaraan tugas pembantuan dalam Pasal 8 PP 7/2008 meliputi:

- 1) Penugasan urusan pemerintahan;
- 2) Tata cara penugasan;
- 3) Tata cara penyelenggaraan; dan
- 4) Penghentian tugas pembantuan.

Pengelolaan dana tugas pembantuan dalam Pasal 8 PP 7/2008 meliputi:

- a. Prinsip pendanaan;
- b. Perencanaan dan penganggaran;
- c. Penyaluran dan pelaksanaan; dan
- d. Pengelolaan barang milik negara hasil pelaksanaan tugas pembantuan.

Pertanggungjawaban dan pelaporan tugas pembantuan dalam Pasal 8 PP 7/2008 meliputi:

- a. Penyelenggaraan tugas pembantuan; dan
- b. Pengelolaan dana tugas pembantuan.

Pelimpahan Urusan Pemerintahan dalam penyelenggaraan dekonsentrasi berdasarkan Pasal 11 PP 7/2008 meliputi: (1) Pelimpahan sebagian urusan pemerintahan dapat dilakukan kepada gubernur. (2) Selain dilimpahkan kepada gubernur, sebagian urusan pemerintahan dapat pula dilimpahkan kepada: (a) instansi vertikal; (b) pejabat Pemerintah di daerah. Jangkauan pelayanan atas penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan dapat melampaui satu wilayah administrasi pemerintahan provinsi.

Untuk urusan pemerintahan yang dapat dilimpahkan kepada gubernur dalam Pasal 13 ayat (3) PP 7/2008, didanai dari APBN bagian anggaran kementerian/lembaga melalui dana dekonsentrasi. Pendanaan dalam rangka dekonsentrasi dialokasikan untuk kegiatan yang bersifat non-fisik. Penyaluran dana dekonsentrasi dilakukan oleh Bendahara Umum Negara atau kuasanya melalui Rekening Kas Umum Negara. Penerimaan sebagai akibat pelaksanaan dekonsentrasi merupakan penerimaan negara dan wajib disetor oleh Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran ke Rekening Kas Umum Negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Semua barang yang dibeli atau diperoleh dari pelaksanaan dana dekonsentrasi merupakan barang milik negara. Barang milik negara tersebut dapat dihibahkan kepada daerah.

Pertanggungjawaban dan pelaporan dekonsentrasi mencakup aspek manajerial dan aspek akuntabilitas. Aspek manajerial terdiri dari perkembangan realisasi penyerapan dana, pencapaian target keluaran, kendala yang dihadapi, dan saran tindak lanjut. Aspek akuntabilitas terdiri dari laporan realisasi anggaran, neraca, catatan atas laporan keuangan, dan laporan barang. Kepala SKPD provinsi bertanggung jawab atas pelaporan kegiatan dekonsentrasi. Kepala SKPD provinsi selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dekonsentrasi bertanggung jawab atas pelaksanaan dana dekonsentrasi.

Berkenaan dengan tugas pembantuan, pemerintah dapat memberikan tugas pembantuan kepada pemerintah provinsi atau kabupaten/kota dan/atau pemerintah desa untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan. Pemerintah provinsi, juga dapat memberikan tugas pembantuan kepada pemerintah kabupaten/kota dan/atau pemerintah desa untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan provinsi, serta, Pemerintah kabupaten/kota dapat memberikan tugas pembantuan kepada pemerintah desa untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan kabupaten/kota.

Urusan pemerintahan yang dapat ditugaskan dari Pemerintah kepada pemerintah provinsi atau kabupaten/kota dan/atau pemerintah desa merupakan sebagian urusan pemerintahan diluar 6 (enam) urusan yang bersifat mutlak yang menurut peraturan perundang-undangan ditetapkan sebagai urusan Pemerintah. Urusan pemerintahan yang dapat ditugaskan dari pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota dan/atau pemerintah desa merupakan sebagian urusan pemerintahan yang menurut peraturan perundang-undangan ditetapkan sebagai

urusan pemerintah provinsi. Urusan pemerintahan yang dapat ditugaskan dari pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah desa merupakan sebagian urusan pemerintahan yang menurut peraturan perundang-undangan ditetapkan sebagai urusan pemerintah kabupaten/kota.

Urusan pemerintahan yang dapat ditugaskan dari Pemerintah kepada pemerintah provinsi atau kabupaten/kota dan/atau pemerintah desa didanai dari APBN bagian anggaran kementerian/lembaga melalui dana tugas pembantuan. Urusan pemerintahan yang ditugaskan dari pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota dan/atau pemerintah desa didanai dari APBD provinsi. Urusan pemerintahan yang ditugaskan dari pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah desa didanai dari APBD kabupaten/kota.

Pendanaan dalam rangka tugas pembantuan dialokasikan untuk kegiatan yang bersifat fisik. Semua barang yang dibeli atau diperoleh dari pelaksanaan dana tugas pembantuan merupakan barang milik negara. Barang milik negara dapat dihibahkan kepada daerah. Penghibahan, penatausahaan, penggunaan dan pemanfaatan barang dalam Pasal 57 ayat (2) PP 7/2008, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan barang milik negara/daerah. Pertanggungjawaban dan pelaporan tugas pembantuan juga mencakup aspek manajerial dan aspek akuntabilitas. Aspek manajerial terdiri dari perkembangan realisasi penyerapan dana, pencapaian target keluaran, kendala yang dihadapi, dan saran tindak lanjut. Aspek akuntabilitas terdiri dari laporan realisasi anggaran, neraca, catatan atas laporan keuangan, dan laporan barang. Kepala SKPD provinsi atau kabupaten/kota selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Barang tugas pembantuan

bertanggung jawab atas pelaksanaan dana tugas pembantuan. Pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK atas pengelolaan dan pertanggungjawaban dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan meliputi pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Pemeriksaan keuangan berupapemeriksaan atas laporan keuangan. Pemeriksaan kinerja berupa pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara yang terdiri dari pemeriksaan atas aspek ekonomi dan efisiensi serta aspek efektivitas.

Pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK atas pengelolaan dan pertanggungjawaban dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan meliputi pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Pemeriksaan keuangan berupa pemeriksaan atas laporan keuangan. Pemeriksaan kinerja berupa pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara yang terdiri dari pemeriksaan atas aspek ekonomi dan efisiensi serta aspek efektivitas. Pemeriksaan dengan tujuan tertentu meliputi pemeriksaan atas hal-hal lain di bidang keuangan, pemeriksaan investigatif, dan pemeriksaan atas sistem pengendalian intern Pemerintah

3. Konsep Pelimpahan Kewenangan

Menurut pendapat wasistiono (2009:47) yang mengemukakan kewenangan adalah kekuasaan yang sah (*legitimate power*) atau kekuasaan yang terlambangkan (*institutionalized power*). Dan kekuasaan pada dasarnya adalah merupakan kemampuan yang membuat seseorang atau orang lain untuk untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu sesuai keinginannya. Dalam pengertian administrasi, hal ini diarahkan untuk mencapai tujuan bersama (organisasi),

dengan demikian disimpulkan bahwa dalam kewenangan terdapat kekuasaan, dan sebaliknya. Jadi kewenangan dan kekuasaan pada dasarnya merupakan dua sisi yang tidak dapat dipisahkan.

Sedangkan dalam Ensiklopedia administrasi (dalam Wasistiono dkk, 2009:49), wewenang didefinisikan sebagai hak seorang pejabat untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas dan tanggung jawabnya dapat dilaksanakan dengan baik.

Pendelegasian atau pelimpahan kewenangan (*delegation of authority*) dapat dilihat dari beberapa aspek, yakni aspek tugas, tanggung jawab dan wewenang. Pada prinsipnya, pendelegasian atau pelimpahan sama dengan penyerahan, jadi pendelegasian atau kewenangan berarti penyerahan sebgai hak untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas dan tanggung jawabnya dapat dilaksanakan dengan baik dari pejabat satu ke pejabat lainnya. Menurut Sutarto (2002:144-145), pelimpahan kewenangan itu bukan penyerahan hak dari atasan kepada bawahan, melainkan penyerahan hak dari pejabat ke pejabat. Format pendelegasian wewenang dapat dilakukan oleh pejabat yang berkedudukan lebih tinggi (*superior*) kepada pejabat yang kedudukan rendah (*subordinate*) atau pejabat atasan kepada pejabat bawahan, disamping itu pelimpahan wewenang dapat dilakukan diantara pejabat yang berkedudukan pada jenjang yang sama atau pejabat yang sederajat. Pelimpahan wewenang menegak atau vertical, sedangkan pelimpahan wewenang yang kedua diartikan pelimpahan wewenang mendatar atau horizontal.

Dilihat dari sumbernya kewenangan dapat menjadi 2 jenis (Wasistiono, 2009:26), yaitu :

1. Kewenangan atributif, adalah kewenangan yang melekat dan diberikan kepada suatu institusi atau pejabat yang berdasarkan peraturan perundang-undang.
2. Kewenangan delegatif, adalah kewenangan yang berasal dari pendelegasian kewenangan dari institusi atau pejabat yang lebih tinggi.

Masing-masing pejabat diberikan tugas melekat sebagai bentuk tanggung jawab agar tugas yang diberikan itu dapat dilaksanakan dengan baik. Tanggung jawab merupakan keharusan pada seseorang pejabat atau melaksakan secara layak segala sesuatu yang telah dibebankan kepadanya. Tanggung jawab hanya dapat dipenuhi bila pejabat yang bersangkutan disertai dengan wewenang tertentu dalam bidang dan tugasnya. Dengan tindakan otoritas itu, tanggung jawab tidak dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Jadi ada kolerasi antara tugas, tanggung jawab dan wewenang.

4. Konsep kebijakan

Istilah kebijakan atau sebagian orang mengistilahnkannya kebijaksanaan seringkali disamakan pengertiannya dengan policy. Hal tersebut barang kali dikarenakan sampai saat ini belum diketahui terjemahan yang tepat istilah policy ke dalam bahasa Indonesia.

Secara umum istilah kebijakan atau policy digunakan untuk menunjuk perilaku seorang actor (misalnya seorang pejabat, suatu kelompok maupun suatu lembaga pemerintah) atau sejumlah aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu (Winarno, 2012:19).

Menurut Dunn (2003:105) perumusan kebijakan adalah merupakan suatu informasi yang relevan dengan kebijakan guna dimanfaatkan pada tingkat politik dalam rangka pemecahan suatu masalah, adapun indikasi dari perumusan masalah kebijakan ini adalah:

1. Pengelolaan informasi yaitu usaha yang dilakukan oleh setiap badan atau instansi yang dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam pembuatan suatu kebijakan.
2. Penetapan alternative-alternatif, merupakan penilaian yang diperoleh dari beberapa usulan yang ada.
3. Penerapan sarana keputusan, menggunakan berbagai potensi yang dimiliki oleh badan/instansi tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam pembuatan kebijakan,
4. Penilaian terhadap isi kebijakan, melakukan tindakan evaluasi yang dilakukan oleh pembuat kebijakan.

Selanjutnya Rose (dalam Winarno, 2012:20) menyarankan bahwa kebijakan hendaknya dipahami sebagai “serangkaian kegiatan yang sedikit banyak berhubungan beserta konsekuensi-konsekuensinya bagi mereka yang bersangkutan dari pada sebagai suatu keputusan sendiri”.

Anderson (dalam Winarno, 2012:21) kebijakan merupakan arah tindakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor dalam mengatasi masalah ataupun personalnya.

Menurut Dunn (2003:105) perumusan kebijakan adalah merupakan suatu informasi yang relevan dengan kebijakan guna dimanfaatkan pada tingkat politik

dalam rangka pemecahan suatu masalah. Adapun indikasi dari pada perumusan kebijakan ini adalah:

1. Pengolahan informasi yaitu usaha yang dilakukan oleh setiap badan atau instansi yang dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam pembuatan suatu kebijakan
2. Penetapan alternative-alternatif, merupakan penilaian yang diperoleh dari beberapa usulan yang ada.
3. Penerapan sarana keputusan, menggunakan berbagai potensi yang dimiliki oleh badan/instansi tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam pembuatan kebijakan.
4. Penilaian terhadap isi kebijakan, meakukan tindakan evaluasi yang dilakukan oleh pembentukan kebijakan.

Untuk memecahkan, mengurangi atau mencegah terjadinya suatu masalah, diperlukan suatu kebijakan yang diformulasikan dengan mempunyai fungsi dan sasaran tertentu, dimana untuk mencapai tujuan dan sasaran dari kebijakan tetentu diperlukan suatu implementasi dari kebijakan itu sendiri yang merupakan proses lebih lanjut dari tahap formulasi kebijakan hal ini sesuai dengan pendapat (Abidin, 2002:20).

Banyak pakar menyebutkan bahwa kebijakan pemerintah sebagai kekuasaan pengalokasian nilai-nilai untuk masyarakat secara keseluruhan. Ini mengandung konotasi tentang kewenangan pemerintah yang meliputi keseluruhan kehidupan masyarakat kecuali pemerintah. Menurut Carl Friedman mengatakan

bahwa yang paling pokok bagi suatu kebijakan adalah tujuan (goal), sasaran (objective), atau kehendak (purpose). (Abidin, 2002:20)

Perbuatan kebijakan merupakan suatu aktivitas yang diarah tujuannya sebagai yang memiliki ciri tersendiri dari aktivitas dan ekspresif murni yang bertujuan untuk mempengaruhi prospektif (masa depan) alternative dalam arah yang dikehendaki. (Tangkilisan, 2003:6).

Kemudian Ibrahim (2004:2) mengemukakan bahwa kebijakan itu adalah prosedur memformulasikan suatu yang berdasarkan aturan tertentu, disebutkan juga bahwa kebijaksanaan itu bentuknya nyata (praktis) dari kebijakan.

Selanjutnya istilah public adalah dalam rangkaian kata public policy mengandung tiga konotasi: pemerintah, masyarakat dan umum (Abidin, 2002:10). Sedangkan menurut Nugroho (2006:25) kebijakan public adalah kebijakan yang mengatur kehidupan bersama atau kehidupan publik, bukan kehidupan seseorang atau golongan.

Kebijakan publik menurut Dwijowijoto (2008:58) adalah keputusan yang dibuat oleh Negara khususnya pemerintah sebagai strategi untuk tujuan Negara yang bersangkutan. kebijakan publik adalah strategi untuk mengantar masyarakat pada masa awal, memasuki masyarakat pada masa transisi, untuk menuju masyarakat yang dicita-citakan.

Kebijakan publik menurut Dwijowijoto (2008:59) dibagi menjadi dua, yaitu :

1. Regulasi versus deregulatif : kebijakan yang menetapkan hal-hal yang dibatasi dan hal-hal yang dibebaskan dari pembatasan-pembatasan.

2. Alokasi versus distributive : kebijakan yang berkenaan dengan anggaran atau keuangan publik

Sedangkan menurut Nugroho (2006:25) kebijakan publik adalah kebijakan yang mengatur kehidupan bersama atau kehidupan atau kehidupan publik, bukan kehidupan seseorang atau golongan.

Kita melihat bahwa ada empat kegiatan pokok yang berkenaan dengan kebijakan publik, yaitu :

1. Perumusan kebijakan
2. Implementasi kebijakan
3. Evaluasi kebijakan
4. Revisi kebijakan yang merupakan perumusan kembali dari kebijakan.

Menurut Easton kebijakan pemerintah adalah kewenangan atau pengalokasian nilai-nilai bagi masyarakat secara menyeluruh, berarti yang berwenang mengatur secara menyeluruh kepentingan masyarakat adalah pemerintah. (dalam Lubis 2007:8).

5. Konsep Evaluasi

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, evaluasi adalah suatu penilaian dimana penilaian itu ditujukan pada orang yang lebih atau kepada orang yang lebih rendah, baik itu dari jabatan setrukturnya atau orang yang lebih rendah keahliannya. Evaluasi adalah suatu proses penelitian positif dan negatif atau juga gabungan dari keduanya. (Depdikbud, 2002:45).

Adapun Nurcholis (2005:169) evaluasi merupakan suatu proses yang mendasarkan diri pada disiplin ketat dan tahap waktu. Maka dapat mengetahui

hasil dari kegiatan atau program yang telah direncanakan. Dengan evaluasi dapat diketahui hambatan-hambatan atau kendala yang terjadi dari suatu kegiatan.

Dunn (2003:609) istilah evaluasi mempunyai arti yang berhubungan, masing-masing menunjukkan pada aplikasi berada sekala nilai terhadap hasil kebijakan dan program. Secara umum istilah evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran, pemberian angka dan penilaian yang menyatakan usaha untuk menganalisis hasil kebijakan dalam arti suatu nilai. Dalam arti spesifik, evaluasi berkenaan dengan produk informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan.

Selanjutnya kriteria evaluasi menurut Dunn (2003:610) adalah sebagai berikut :

1. Efektifitas, apakah hasil yang diinginkan telah tercapai
2. Efisiensi, yaitu berapa usaha yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan.
3. Kecukupan, yaitu seberapa jauh pencapaian hasil yang diinginkan memecahkan masalah
4. Pemerataan adalah apakah biaya yang tersedia telah tersedia, telah dimanfaatkan, dan telah didistribusikan secara merata.
5. Responsivitas, adalah apakah hasil kebijakan memuaskan kebutuhan, profesi, dan nilai kelompok-kelompok tertentu.
6. Ketetapan, adalah apakah hasil (tujuan) yang diinginkan benar-benar berguna atau bernilai.

Menurut Dunn (2003:187) evaluasi memiliki tiga fungsi utama dalam analisis kebijakan, yaitu :

1. Evaluasi memberi informasi yang salah dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan, yaitu seberapa jauh kebutuhan, nilai dan kesempatan yang telah dapat dicapai melalui tindakan publik. Dalam hal ini evaluasi mmengungkapkan sebara jauh tujuan-tujuan tertentu dan target tertentu dan target tertentu telah dicapai.
2. Evaluasi memberi sumbangan pada klasifikasi dan keritik terhadap nilai-nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan target. Nilai diperjelas dengan mendefinisikan dan mengoprasikan tujuan dan target.
3. Evaluasi memberi sumbangan pada palikasi metode-metode analisis kebijakan lainnya, termasuk perumusan masalah dan rekomendasi. Informasi tentang tidak memadai kinerja kebijakan yang dapat memberi sumbangan pada perumusan ulang masalah kebijakan.

Selanjutnya Subarsono (2009:19) evaluasi dilakukan untuk melihat tingkat kinerja suatu kebijakan, sejauh mana kebijakan tersebut mencapai sasaran dan tujuannya. Evaluasi berguna untuk memberikan bagi kebijakan yang akan supaya lebih baik.

Sedangkan menurut Ndraha (2003:201) evaluasi adalah proses perbandingan antara standar dengan fakta dengan analisis hasilnya. Ada berbagai model evaluasi. Tiga diantaranya sebagai berikut:

1. Model *before-after* yaitu perbandingan antara sebelum ddan sesudah suatu tindakan (perlakuan, treatment). Tolak ukurnya adalah *before*
2. Model Das Sollen – Das Sein, yaitu perbandingan dengan yang seharusnya dengan yang senyatanya. Tolak ukurnya adalah *das solen*.

3. Model Kelompok Kontrol – Kelompok Tes, yaitu perbandingan antara kelompok control (tanpa perlakuan) dengan kelompok tes (diberi perlakuan). Tolak ukurnya adalah kelompok kontrol.

Menurut Finsterbuch dan Motz dalam Subarsono (2005:13) menyatakan bahwa ada empat jenis evaluasi yaitu:

1. Single program after only

Evaluasi single program after-only merupakan desain yang paling lemah karena tidak diketahui juga kelompok sasaran sebelum menerima program.

2. Single program after – before

Evaluasi single program after-before dapat digunakan untuk mengetahui keadaan kelompok sasaran sebelum menerima program tetapi tidak dapat mengetahui efek dari program tersebut.

3. Comparative after only

Evaluasi comparative after only merupakan evaluasi dengan cara membandingkan kelompok sasaran dengan kelompok bukan sasaran. Pada evaluasi jenis ini efek program pada kelompok sasaran tidak diketahui.

4. Comparative before only

Comparative before only merupakan gabungan dari ketiga kelompok diatas. Sehingga kelemahan yang ada ketiga desain diatas dapat diatasi oleh desain evaluasi ini.

Uraian diatas dapat diartikan bahwa evaluasi perlu dilakukan karena tidak semua kebijakan yang dibuat dapat diimplementasikan sesuai rencana atau bahkan sebuah kebijakan tidak dapat dijalankan, sehingga dengan adanya evaluasi dapat

memberikan masukan, kritik dan saran terhadap kebijakan yang dibuat mulai dari implementasi sampai dengan dampak atau hasil dari kebijakan yang terjadi.

6. Konsep Pengawasan

Walaupun perencanaan, menyusun organisasi, menjuruskan dan mengkoordinasi pekerjaan telah dilaksanakan dengan baik, namun tetap perlu bagi manajemen untuk mengadakan “control” pengawasan dan penelitian atas segala macam pekerjaan itu.

“control tidaklah berarti mengontrol saja, namun meliputi juga aspek penelitian, apakah yang dicapai itu sesuai dan sejalan dengan tujuan-tujuan yang sudah ditetapkan, lengkap dengan rencananya, kebijakan, program dan lain sebagainya dari pada manajemen.

Dengan kata lain pengawasan diperlukan untuk menjamin bahwa pelaksanaan tidak terlalu menyimpang dari rencana, jika ada penyimpangan maka itu diterima secara rasional dan efisien (Panglaykim, 1991;176).

Pengawasan menurut Terry (dalam Syafie, 2011;109) dapat dirumuskan sebagai proses penentuan apa yang harus dicapai yaitu standar, apa yang sedang dilakukan yaitu menilai pelaksanaan, dan bila perlu melakukan perbaikan-perbaikan sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana yaitu selaras dengan standar (ukuran)

Batasan pengawasan yang lain seperti menurut Robbins (2002: 113) bahwa yang dimaksud pengawasan adalah proses mengikuti perkembangan kegiatan untuk menjamin jalannya pekerjaan, dengan demikian dapat selesai

secara sempurna sebagaimana yang direncanakan sebelumnya, dengan pengkoreksian beberapa pemikiran yang saling berhubung .

Pendapat lain menurut Siagian (dalam Syafie, 2011;110) mengatakan bahwa pengawasan adalah proses pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.

Defenisi pengawasan menurut Syafii (2011;12) adalah salah satu fungsi dalam manajemen pemerintah untuk menjamin agar pelaksanaan kerja pemerintah berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dalam perencanaan pemerintah, agar masyarakat serta warga bangsa mencapai keadaan adil makmur dalam waktu yang sudah ditentukan bersama.

Sementara itu definisi pengawasan menurut Marnis (2008;329) adalah proses pemantauan kegiatan organisasional untuk mengetahui apakah kinerja actual sesuai dengan standard an tujuan organisasional yang diharapkan.

Menurut Sukarna (2011;110) memberikan definisi pengawasan sebagai membimbing, menertibkan, mengatur dan menguji kebenaran. Oleh karena itu dalam kata pengawasan terungkap arti pembimbing, penertiban dan pengaturan, pemeriksaan serta pengendalian. Oleh karena itu pengawasan mempunyai peran atau kedudukan yang penting sekali dalam manajemen, mengingat mempunyai fungsi untuk menguji apakah pelaksanaan kerja itu teratur, tertib, terarah atau tidak.

Perinsip-perinsip pengawasan menurut Herujito (2001;242) adalah:

1. Mencerminkan sifat dari apa yang diawasi
2. Dapat diketahui dengan segera penyimpangan yang terjadi

3. Luwes
4. Mencerminkan pola organisasi
5. Ekonomis
6. Dapat mudah dipahami
7. Dapat segera diadakan perbaikan

Pelaksanaan pengawasan menurut Herujito (2001;243) dengan empat cara yaitu:

1. Mengawasi langsung ditempat
2. Melalui laporan
3. Melalui tulisan
4. Melalui penjagaan khusus.

Menurut Panglaykim (1991;182) untuk dapat melihat atau mengontrol pengawasan ini ada beberapa cara:

1. Mengadakan peninjauan sendiri
2. Laporan secara lisan
3. Laporan secara tertulis.

Tujuan utama dari pengawasan ialah agar apa yang direncanakan menjadi kenyataan. Oleh karena itu agar sistem pengawasan benar-benar efektif artinya dapat merealisasikan tujuannya maka suatu sistem pengawasan setidak-tidaknya harus dapat dengan segera melaporkan adanya penyimpangan-penyimpangan dari rencana. (Manulang, 2006:174).

7. Konsep Pengelolaan

a. Pengertian Pengelolaan

Kamus besar bahasa Indonesia (1997) kata pengelolaan berasal dari kata dasar “kelolah” yang artinya mengurus suatu bidang usaha (perusahaan, pertanian, dan sesuatu yang mempunyai tujuan). Sedangkan arti pengelolaan itu sendiri adalah proses, cara perbuatan pengelola; proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain; proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan organisasi; proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan dan pencapaian tujuan.

Balderton (dalam Adisasmita, 2011:22) mengemukakan bahwa istilah pengelolaan sama dengan manajemen yaitu menggerakkan, mengorganisasikan, dalam mengarahkan usaha manusia memanfaatkan secara efektif material dan fasilitas untuk mencapai tujuan.

Harsoyo (1977:121) pengelolaan adalah suatu istilah yang berasal dari kata “kelolah” mengandung arti serangkaian usaha yang bertujuan untuk menggali dan memanfaatkan segala potensi yang dimiliki secara efektif dan efisien guna mencapai tujuan tertentu yang telah direncanakan sebelumnya.

Hamalik (dalam Adisasmita 2011:22) istilah pengelolaan identic dengan istilah manajemen, dimana manajemen itu sendiri merupakan satu proses untuk mencapai tujuan.

Moekijat (dalam Adisasmita 2011:21) mengemukakan bahwa pengelolaan adalah suatu proses tertentu yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, tujuan tertentu dengan cara menggunakan manusia dan sumber-sumber lain.

Menurut Pamudji pengelolaan menitik beratkan pada dua factor penting yaitu:

1. Pengelolaan sebagai pembangunan yang merubah suatu sehingga menjadi baru dan memiliki nilai yang lebih tinggi.
2. Pengelolaan sebagai pembaharuan yaitu usaha untuk memelihara sesuatu agar lrbih cocok dengan kebutuhan.

Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa pengelolaan adalah sebuah kegiatan merubah suatu sumber daya menjadi lebih bernilai dari sebelumnya melalui proses perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan agar tercapainya tujuan tertentu.

b. Pengertian Pengelolaan Sampah

Pengelolaan sampah merupakan peraturan daerah Indragiri Hilir nomor 8 tahun 2014 adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan kesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.

Pengelolaan sampah adalah pengumpulan, pengangkutan, pemrosesan, daur-ulang atau pembuangan material sampah. Kalimat ini biasanya mengacu pada material sampah yang dihasilkan dari kegiatan manusia, dan biasanya dikelola untuk mengurangi dampaknya terhadap kesehatan, lingkungan, dan keindahan. Pengelolaan sampah juga dilakukan untuk memulihkan sumber daya alam. Pengelolaan sampah biasa melibatkan zat padat, cair, gas, atau radio aktif dengan metode dan keahlian khusus untuk masing-masing zat.

Cara-cara pengelolaan sampah:

1. Hog Feeding

Yaitu penggunaan sampah garbage untuk pakan ternak

2. Inseneration (pembakaran)

Yaitu dengan pembuangan sampah di TPA, kemudian dibakar. Pembakaran sampah dilakukan ditempat tertutup dengan mesin dan peralatan khusus yang dirancang untuk pembakaran sampah. System ini memerlukan biaya besar untuk pembangunan, operasional dan pemeliharaan mesin dan peralatan lain.

3. Sanitary Landfill

Yaitu pembuangan sampah dengan cara menimbun sampah dengan tanah yang dilakukan lapis demi lapis, sedemikian rupa sehingga sampah tidak berapa dialam terbuka, jadi tidak sampai menimbulkan bau serta tidak menjadi tempat binatang bersarang. Cara ini tentu sangat bermanfaat jika sekaligus bertujuan untuk meninggikan tanah yang rendah seperti rawa-rawa, genangan air dan sebagainya.

4. Composting (pengomposan)

Merupakan pemanfaatan sampah organik menjadi kompos. Untuk tujuan pengomposan sampah harus dipilah-pilah sehingga sampah organik dan anorganik terpisah.

5. Discharge to Seweres

Disini sampah harus dihaluskan dan kemudian dibuang kedalam saluran pembuangan air bekas. Cara ini dapat dilakukan pada rumah tangga atau dikelola secara terpusat dikota-kota. Cara ini membutuhkan biaya yang besar serta tidak mungkin dilakukan jika sistem pembuangan air kotor tidak baik.

6. Dumping (penumpukan)

Yaitu pembuangan sampah dengan penumpukan diatas tanah terbuka. Dengan cara ini TPA memerlukan tanah yang luas dan sampah ditumpuk begitu saja tanpa adanya perlakuan. Sistem *dumping* memang dapat menekan biaya, tetapi sudah jarang dilakukan karena masyarakat sekitarnya sangat terganggu. Cara ini berpengaruh buruk terhadap lingkungan, berupa sumber penyakit, tempat binatang bersarang.

7. Individual Inceneration

Ialah pembakaran sampah yang dilakukan perorangan dirumah tangga. Pembakaran haruslah dilakukan dengan baik, jika tidak asapnya akan mengotori udara serta dapat menimbulkan bahaya kebakaran.

8. Recycling

Ialah menghancurkan sampah menjadi jumlah yang lebih kecil dan hasilnya dimanfaatkan misalnya kaleng, kaca dan sebagainya. Cara ini berbahaya untuk kesehatan, terutama jika tidak mengindahkan segi kebersihan.

B. Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian terdahulu yang meneliti tentang sampah adalah sebagai berikut:

Tabel II.1 : Persamaan dan Perbedaan Penelitian Ini Dengan Penelitian Terdahulu

NO	Nama Peneliti/Tahun	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Sahnuriana (2016)	Evaluasi Pelaksanaan Tupoksi Dinas Kebersihan dan Pertanaman dalam Pengelolaan sampah di kawasan ratu kemuning Kabupaten Karimun (studi Seksi Kebersihan)	1. Sama-sama meneliti di dinas lingkungan hidup dan kebersihan	1. Lebih spesifik kepada tugas dinas 2. Lokasi Penelitian berbeda
2	Agussalim. KH (2017)	Peran Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Indragiri Hilir Terhadap Pengelolaan Sampah	1. Meneliti tentang sampah 2. Pelaksanaan pengelolaan sampah Dilakukan oleh dinas yang sama	1. Lebih berfokus kepada peranan dinas lingkungan hidup dan kebersihan, sedangkan penelitian ini berfokus kepada penyelenggaraan Pengelolaan sampah
3	Syaiful Bahri (2015)	Strategi pengelolaan sampah oleh dinas Kebersihan Pertanaman dan pemakaman (DKPP) Di Kabupaten Tangerang	1. Meneliti tentang pengelolaan sampah 2. Pelaksanaan Pengelolaan sampah dilakukan oleh dinas yang sama	1. Lebih berfokus kepada peranan dan strategi dalam pelaksanaan pengelolaan sampah. 2. Lokasi penelitian berbeda
4	Yudi Anugerah Purwadi (2017)	Implementasi Peraturan daerah Indragiri Hilir Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan sampah (studi tentang forum masyarakat peduli sampah)	1. Sama –sama meneliti tentang peraturan daerah Indragiri Hilir nomor 8 tahun 2014 tentang pengelolaan sampah	1. Studi/objek penelitiannya berbeda

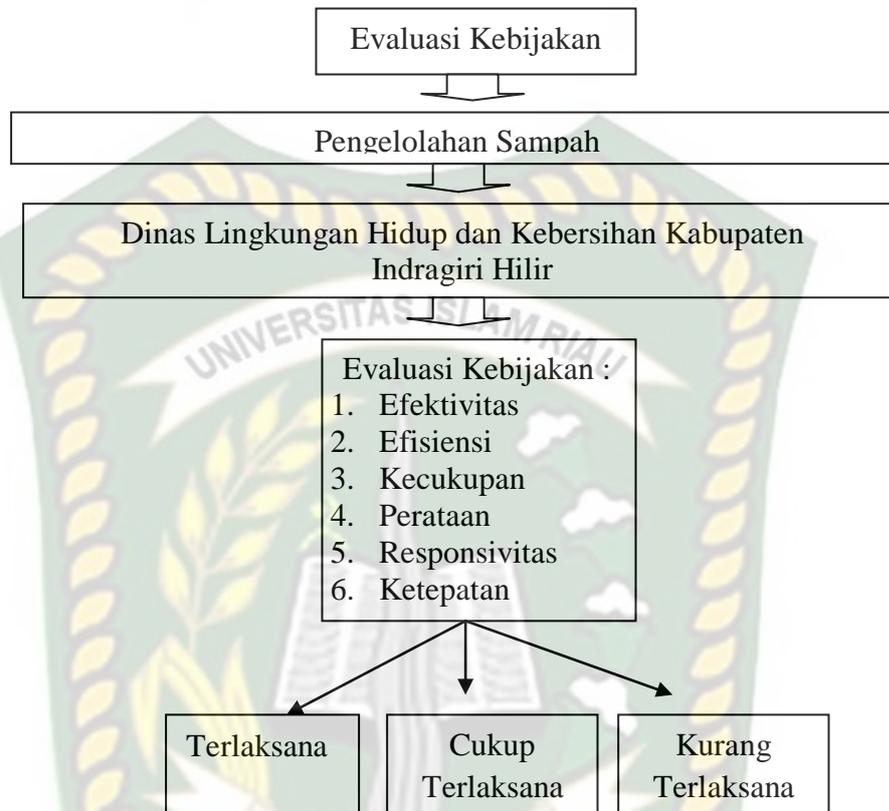
Sumber : Olahan Data penelitian, 2019

Berdasarkan tabel diatas Persamaan dan Perbedaan dengan si peneliti adalah perbedaan didalam teori yang digunakan dan sipeneliti menggunakan penggabungan metode kuantitatif dengan kualitati, dan akan hasil penelitian, hal ini bertujuan agar tidak adanya perbedaan dengan sipeneliti, dan memiliki persamaan pada lokasih penelitian.

C. Kerangka Pikiran

Kerangka pikiran ini menggambarkan tentang keterkaitan antara variabel-variabel peneliti dengan indikator-indikator yang mempengaruhi, dilandasi dengan konsep maupun teori-teori yang dianggap relevan yang berguna untuk membangun pemikiran dan konsep dalam menganalisis dan memecahkan permasalahan yang dihadapi sehubungan dengan penelitian ini. Berikut ini adalah gambaran tentang kerangka pikiran Evaluasi Tugas Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan dalam Pengelolaan Sampah Di Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir :

Gambar II.1 : Kerangka pikiran tentang Evaluasi Tugas Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan dalam Pengelolaan Sampah Di Kecamatan Tembilihan Kabupaten Indragiri Hilir.



Sumber: modifikasi penelitian 2019

D. Konsep Operasional

Untuk memberi suatu pemahaman agar memudahkan penelitian, maka perlu adanya beberapa batasan penelitian dan fokus penelitian ini yang dioperasionalkan melalui indikator sebagai berikut.

1. Evaluasi merupakan suatu kegiatan penilaian terhadap hasil kerja yang dicapai berdasarkan standar yang harus dicapai yang dalam penelitian ini adalah pelaksanaan kebijakan pemerintah Indragiri Hilir dalam Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 20 tahun 2011 tentang pengelolaan sampah

2. Pemerintah Daerah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir
3. Pengelolaan sampah adalah suatu kegiatan yang merubah sampah menjadi lebih bernilai yang melalui proses perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan agar tercapainya tujuan
4. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan atau proses alam yang berbentuk padat
5. Epektifitas dalam tulisan ini adalah berjalannya kebijakan dengan baik sebagaimana mestinya sehingga tidak adanya sampah yang berserakan serta tercapainya tujuan
6. Efisiensi dalam tulisan ini adalah terpenuhinya segala bentuk pelayanan dan pengelolaan terhadap sampah dengan kesediaan sumber daya manusia, waktu, dan sarana dan prasarana yang ada
7. Kecukupan dalam tulisan ini adalah ketersediaan fasilitas seperti truk pengangkutan sampah dan tempat pembuangan sampah sementara
8. Pemerataan dalam tulisan ini adalah pelayanan pengelolaan sampah dilakukan secara merata tidak hanya di jalan-jalan besar tetapi juga sampai dilingkungan perumahan dan merata diseluruh wilayah kecamatan Tembilahan
9. Responsivitas dalam tulisan ini adalah respon atau tanggapan dari Pelaksanaan Kabupaten Indragiri Hilir.
10. Ketepatan dalam tulisan ini adalah pelaksanaan pelayanan pengelolaan sampah menjadi hasil yang berguna dan bernilai

E. Operasional Variabel

Table II.2 : Operasional Variabel penelitian tentang Evaluasi Tugas Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan dalam Pengelolaan Sampah Di Kecamatan Tembilihan Kabupaten Indragiri Hilir.

Konsep 1	Variabel 2	Indikator 3	Item Penilaian 4	Ukuran 5
Evaluasi ialah penaksiran (<i>appraisal</i>) pemberian angka (<i>rating</i>) dan penilaian (<i>asessment</i>), kata-kata yang menyatakan usaha untuk menganalisis hasil kebijakan, nilai atau manfaat hasil kebijakan. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa kebijakan atau program telah mencapai tingkat kinerja yang bermakna, yang berarti bahwa masalah-masalah kebijakan dibuat jelas dan diatasi (Dunn, 2003 :608)	Pengelolaan Sampah	a. Efektifitas	a. Penetapan Peraturan b. Sosialisasi bentuk penaganan sampah. c. Pengawasan Sampah.	Terlaksana Cukup Terlaksana Kurang Terlaksana
		b. Efisiensi	a. Waktu pengangkutan. b. Pembinaan terhadap masyarakat. c. Penertiban pembuangan sampah.	Terlaksana Cukup Terlaksana Kurang Terlaksana
		c. Kecukupan	a. Kerjasama pegawai. b. Kerjasama dengan masyarakat.	Terlaksana Cukup Terlaksana Tidak Terlaksana
		d. Perataan	a. Waktu pengangkutan Sampah. b. Penyediaan tempat penampungan Sampah. c. Pemberian Sanksi.	Terlaksana Cukup Terlaksana Tidak Terlaksana
		e. Responsivitas	a. Penerimaan keluhan masyarakat. b. Evaluasi pencapaian penanganan sampah. c. Solusi penanganan sampah	Terlaksana Cukup Terlaksana Tidak Terlaksana
		f. Ketepatan	a. Pelayanan pengangkutan Sampah. b. Memaksimalkan hasil penangan sampah. d. Penyediaan sarana prasarana pengangkutan sampah.	Terlaksana Cukup Terlaksana Tidak Terlaksana

Sumber: Data Modifikasi Penelitian, 2019

F. Teknik Pengukuran

Untuk mengetahui bagaimana Tugas Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan dalam Pengelolaan Sampah Di Kecamatan Tembilihan Kabupaten Indragiri Hilir dengan menentukan pengukuran masing-masing indikator dari variable penelitian ini, diklarifikasikan dalam 3 (tiga) katagori yaitu: terlaksana,

cukup terlaksana dan kurang terlaksana. Uraian dari masing-masing pengukuran tersebut adalah sebagai berikut:

Terlaksana :Apabila hasil rata-rata penilaian responden pada tabel rekapitulasi pada katagori terlaksana dengan presentase berada antara 67%-100%.

Cukup Terlaksana ;Apa bila hasil rata-rata penilaian responden pada table rekapitulasi adalah pada kategori cukup terlaksana dengan persentase berada antara 34%-66%.

Kurang Terlaksana :Apabila hasil rata-rata penilaian responden pada table rekapitulasi adalah pada kategori kurang terlaksana dengan persentase berada antara 0%-33%.

Adapun pengukuran indicator sebagai berikut :

1. Efektifitas, dikatakan:

Terlaksana :Apabila hasil rata-rata penilaian responden pada tabel rekapitulasi pada katagori terlaksana dengan presentase berada antara 67%-100%.

Cukup Terlaksana ;Apa bila hasil rata-rata penilaian responden pada table rekapitulasi adalah pada kategori cukup terlaksana dengan persentase berada antara 34%-66%.

Kurang Terlaksana :Apabila hasil rata-rata penilaian responden pada table rekapitulasi adalah pada kategori kurang terlaksana dengan persentase berada antara 0%-33%.

2. Efisiensi, dikatakan:

Terlaksana :Apabila hasil rata-rata penilaian responden pada tabel rekapiulasi pada katagori terlaksana dengan presentase berada antara 67%-100%.

Cukup Terlaksana ;Apa bila hasil rata-rata penilaian responden pada table rekapitulasi adalah pada kategori cukup terlaksana dengan persentase berada antara 34%-66%.

Kurang Terlaksana :Apabila hasil rata-rata penilaian responden pada table rekapitulasi adalah pada kategori kurang terlaksana dengan persentase berada antara 0%-33%.

3. Kecukupan, dikatakan:

Terlaksana :Apabila hasil rata-rata penilaian responden pada tabel rekapiulasi pada katagori terlaksana dengan presentase berada antara 67%-100%.

Cukup Terlaksana ;Apa bila hasil rata-rata penilaian responden pada table rekapitulasi adalah pada kategori cukup

terlaksana dengan persentase berada antara 34%-66%.

Kurang Terlaksana :Apabila hasil rata-rata penilaian responden pada table rekapitulasi adalah pada kategori kurang terlaksana dengan persentase berada antara 0%-33%

4. Pemerataan, dikatakan:

Terlaksana :Apabila hasil rata-rata penilaian responden pada tabel rekapiulasi pada katagori terlaksana dengan presentase berada antara 67%-100%.

Cukup Terlaksana ;Apa bila hasil rata-rata penilaian responden pada table rekapitulasi adalah pada kategori cukup terlaksana dengan persentase berada antara 34%-66%.

Kurang Terlaksana :Apabila hasil rata-rata penilaian responden pada table rekapitulasi adalah pada kategori kurang terlaksana dengan persentase berada antara 0%-33%

5. Responsivitas, dikatakan:

Terlaksana :Apabila hasil rata-rata penilaian responden pada tabel rekapiulasi pada katagori terlaksana dengan presentase berada antara 67%-100%.

Cukup Terlaksana ;Apa bila hasil rata-rata penilaian responden pada table rekapitulasi adalah pada kategori cukup

terlaksana dengan persentase berada antara 34%-66%.

Kurang Terlaksana :Apabila hasil rata-rata penilaian responden pada table rekapitulasi adalah pada kategori kurang terlaksana dengan persentase berada antara 0%-33%

6. Ketepatan, dikatakan:

Terlaksana :Apabila hasil rata-rata penilaian responden pada tabel rekapiulasi pada katagori terlaksana dengan presentase berada antara 67%-100%.

Cukup Terlaksana ;Apa bila hasil rata-rata penilaian responden pada table rekapitulasi adalah pada kategori cukup terlaksana dengan persentase berada antara 34%-66%.

Kurang Terlaksana :Apabila hasil rata-rata penilaian responden pada table rekapitulasi adalah pada kategori kurang terlaksana dengan persentase berada antara 0%-33%

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini survey deskriptif yaitu tipe penelitian yang menggambarkan mengenai variable yang diteliti dan metode kuantitatif yaitu penelitian dalam bentuk persentase dan di akhiri dengan penarikan suatu kesimpulan dalam pemberian saran. Sugiyono (2012;80).

Untuk mengetahui dan melihat serta melukiskan keadaan yang sebenarnya secara rinci dan actual dengan melihat masalah dan tujuan yang telah disampaikan sebelumnya dengan pengumpulan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, maka tipe penelitian ini yang digunakan adalah penelitian survey. Pengertian survey dibatasi dengan penelitian yang datanya dikumpulkan dari sampel atau populasi untuk mewakili seluru populasi. Dengan demikian, penelitian survey secara komplit adalah penelitian yang mengambil sampel dari tiap-tiap populasi dengan menggunakan kusioner sebagai alat pengumpulan yang pokok. Penelitian ini akan menuntun si peneliti dalam membuat daftar pertanyaan kusioner yang dimaksud diats untuk disebarakan kepada populasi yang sudah ditentukan.

B. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian ini adalah di Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir. Lokasi ini diambil sebagai lokasi penelitian, karena penulis menemukan fenomena atau indikasi bahwa Kurangnya sosialisasi Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 20 tahun 2011 tentang pengelolaan sampah sehingga masih ditemukan tumpukan sampah di wilayah Kecamatan

Tembilahan dan menjadi tumpukan sampah liar, serta Kurangnya pengawasan dan penyediaan bak sampah sehingga mengakibatkan banyaknya sampah berserakan.

C. Populasi dan Sampel

Menurut Sugiono (2011 : 80) populasi adalah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh penelitian untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.

Adalah jumlah keseluruhan suatu objek yang akan di teliti dalam penelitian ini yang menjadi populasi penelitian adalah Kapala Bidang Pengelolaa, Sampah Petugas Bidang Pengelolaan Sampah, Seksi Penanganan dan Pemrosesan Akhir Sampah, Petugas Sampah, dan Masyarakat Kecamatan Tembilahan. Adapun Subjek penelitian dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel III. 1: Jumlah Populasi Dan Sampel

NO	Jenis Populasi	Populasi	Sampel	Presentase
1	Kapala Bidang Pengelolaan Sampah	1	1	100%
2	Seksi Penanganan dan Pemrosesan Akhir Sampah	1	1	100%
2	Petugas Sampah	8	8	100%
4	Masyarakat Kecamatan Tembilahan	69.498	30	0,04%
Jumlah		69.508	40	0,05%

Sumber; Olahan data penelitian, 2019

Berdasarkan tabel diatas populasi sampel yang digunakan dalam penelitian ini meliputi Kapala Bidang Pengelolaa, Sampah Petugas Bidang Pengelolaan Sampah, Seksi Penanganan dan Pemrosesan Akhir Sampah, Petugas Sampah, dan Masyarakat Kecamatan Tembilahan dengan populasi menyeluruh sebanyak 69.508 sampel dan sampel sebanyak 40.

D. Teknik Penarikan Sampel

Berdasarkan pertimbangan penelitian dan pengelompokan populasi, maka untuk menentukan populasi dan sampel, pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Indragiri Hilir dalam hal ini digunakan penarikan sensus karena jumlah populasi tidak terlalu besar sehingga dapat diketahui jumlah sampel penelitian berjumlah 10 sampel yang terdiri dari Kepala Bidang Pengelola, Sampah Petugas Bidang Pengelolaan Sampah, Seksi Penanganan dan Pemrosesan Akhir Sampah, Petugas Sampah.

Sedangkan Masyarakat Kecamatan Tembilahan menggunakan teknik *Purposive Sampling* yang merupakan teknik penentuan sampel berdasarkan suatu tujuan dan pertimbangan tertentu, dengan jumlah sampel sebanyak 30 sampel penelitian.

E. Jenis dan Sumber Data

1. Data Primer

Data primer adalah data yang di peroleh secara langsung dari sumber di lapangan, melalui wawancara terpimpin dengan mengajukan pertanyaan yang meliputi pelaksanaan Pengelolaan Sampah di Kecamatan Tembilahan.

2. Data Skunder

Data skunder adalah data atau informasi dan keterangan-keterangan yang diperlukan penelitian untuk menjelaskan permasalahan yang diteliti. Adapun data skunder berupa Undang-Undang, buku-buku, jurnal, laporan penelitian yang telah ada, serta sumber-sumber lain yang dibutuhkan dan berkaitan dengan penelitian.

F. Teknik Pengumpulan Data

Untuk menghimpun data yang diperlukan, maka digunakan tehnik pengumpulan data sebagai berikut :

1. Observasi

Yaitu Pengumpulan data yang dilakukan dengan melihat dan mengamati secara langsung peristiwa atau kejadian melalui cara yang sistematis. Teknik ini akan membawa peneliti untuk dapat menangkap arti fenomena dari segi pengertian subjek penelitian, dan dapat merasakan apa yang dirasakan serta dihayati oleh subjek penelitian sehingga meyakinkan peneliti bahwa subyek tersebut dapat menjadi sumber data bagi penelitian (Moleong, 2005:174).

2. Wawancara

Adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua belah pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan terhadap Kepala Bidang pengelolaan Sampah. (Moleong, 2005:186).

3. Kuisisioner

Kuisisioner merupakan cara pengumpulan data dan informasi dengan memberikan sejumlah pertanyaan tertulis kepada responden dengan maksud untuk memperoleh tanggapan mengenai bagaimana pelaksanaan pengelolaan sampah.

4. Dokumentasi

Yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan mengadakan pencatatan atau pendokumentasian yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti, teknik ini digunakan untuk mendapatkan tentang keadaan lokasi penelitian

G. Teknik Analisis Data

Setelah data yang diperoleh dari responden penelitian, lalu diolah untuk selanjutnya disajikan dalam bentuk tabel kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif, agar gambaran Evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 20 tahun 2011 tentang pengelolaan sampah.

H. Jadwal Pelaksanaan Penelitian

Dibawah ini akan dipaparkan mengenai jadwal pelaksanaan penelitian ini dimulai bulan Juli sampai dengan bulan Oktober 2019. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel III.2 : Jadwal Pelaksanaan Penelitian

NO	JENIS KEGIATAN	BULAN DAN MINGGU KE															
		Juli				Agustus				Aeptember				Oktober			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Penyusunan UP																
2	Seminar UP																
3	Revisi UP																
4	Revisi Kuisisioner																
5	Rekomendasi Survey																
6	Survey Lapangan																
7	Analisis Data																
8	Penyusunan Laporan Hasil Penelitian (skripsi)																
9	Konsultasi Revisi Skripsi																
10	Ujian Konferensif Skripsi																
11	Revisi Skripsi																
12	Penggunaan Skripsi																

Sumber : Data Olahan Penelitian, 2019

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Singkat Kabupaten Indragiri Hilir

Kecamatan Tembilahan adalah salah satu dari 20 Kecamatan yang ada dalam kabupaten Indragiri Hilir dengan luas Wilayah 197,37 Km² atau 19,737 Ha. Secara geografis daerah ini berada pada 0°36' LU, 1°07' LS dan antara 102°32' dan 104°10' BT. di kecamatan Tembilahan adalah Seberang Tembilahan dengan luas wilayah 81, 06 Km², Desa tersempit berada di Tembilahan Kota 3.34. KM 2, jumlah penduduk kecamatan Tembilahan berdasarkan jenis kelamin laki-laki sebanyak 32.004 jiwa dan jumlah jenis kelamin perempuan perempuan 30.748 jiwa. Kecamatan Tembilahan merupakan pusat dan jantung kota Kabupaten Indragiri Hilir yang berbatasan dengan;

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Batang Tuaka.
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Enok.
3. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Tembilahan Hulu.
4. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Kuala Indragiri dan Tanah Merah.

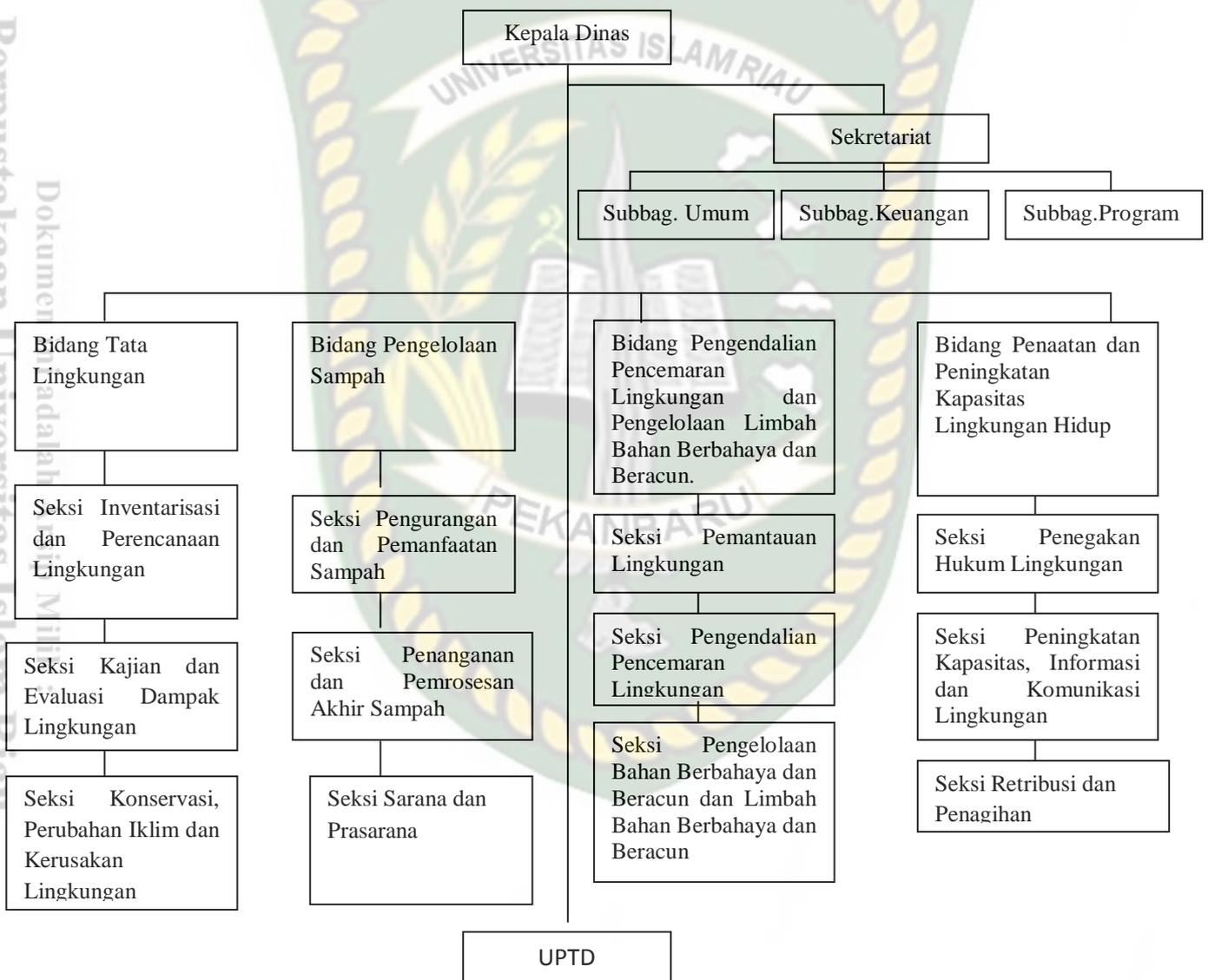
B. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Indragiri Hilir

Adapun Tugas Dan Fungsi Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten

Siak sebagai berikut :

1. Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Indragiri Hilir

Gambar 4. 1 Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Indragiri Hilir



2. Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Indragiri Hilir

Peraturan WaliKabupaten Indragiri Hilir Nomor 103 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Indragiri Hilir

(1) Susunan organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Indragiri Hilir terdiri dari :

- a. Kepala Dinas.
- b. Sekretaris, membawahi :
 1. Sub Bagian Umum.
 2. Sub Bagian Keuangan.
 3. Sub Bagian Program.
- c. Bidang Tata Lingkungan, membawahi :
 1. Seksi Inventarisasi dan Perencanaan Lingkungan.
 2. Seksi Kajian dan Evaluasi Dampak Lingkungan.
 3. Seksi Konservasi, Perubahan Iklim dan Kerusakan Lingkungan.
- d. Bidang Pengelolaan Sampah, membawahi :
 1. Seksi Pengurangan dan Pemanfaatan Sampah.
 2. Seksi Penanganan dan Pemrosesan Akhir Sampah.
 3. Seksi Sarana dan Prasarana.
- e. Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, membawahi :
 1. Seksi Pemantauan Lingkungan.
 2. Seksi Pengendalian Pencemaran Lingkungan.

3. Seksi Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
- f. Bidang Pnaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup, membawahi :
1. Seksi Penegakan Hukum Lingkungan.
 2. Seksi Peningkatan Kapasitas, Informasi dan Komunikasi Lingkungan.
 3. Seksi Retribusi dan Penagihan.
- g. Unit Pelaksana Teknis (UPT).
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.



BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam pelaksanaan penelitian yang mengangkat judul Evaluasi Tugas Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Indragiri Hilir Dalam Pengelolaan Sampah Di Kecamatan Tembilahan. Penelitian ini mengambil data yang dibutuhkan dalam hal mengambil kesimpulan. Adapun data dan hasil responden yang dilakukan dalam penelitian ini akan dipaparkan sebagai berikut :

A. Identitas Responden

Pada bab ini akan disajikan beberapa hal yang berkaitan dengan identitas responden dan hasil jawaban yang diperoleh dari hasil penyerahan kuisioner dan wawancara.

1. Identitas Responden

Dalam pelaksanaan penyebaran Kuisioner, wawancara dan kuisioner yang sudah disajikan kepada responden, maka langkah awal yang harus dipenuhi adalah berupa identitas responden dan yang dijadikan responden pada penelitian ini memiliki tingkat pendidikan yang berbeda dan diskriminasi oleh pegawai yang disajikan sebagai sampel dalam penelitian ini. Adapun dinilai bahwa tingkat pendidikan ini dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian ini adalah pada tingka analisis yang akan diberikan dalam menilai Pelaksanaan P Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 20 tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah di kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir. Hal ini dapat dilihat

dari jumlah responden yang terdiri dari jenis kelamin, umur dan pendidikan, yang dapat dilihat pada tabel dibawa ini :

Tabel V.1. Klasifikasi Responden Penelitian Berdasarkan Jenis Kelamin.

No	Jenis Kelamin	Jumlah Responden	Persentase(%)
1	Laki-Laki	31	77%
2	Perempuan	9	23%
Jumlah		40	100%

Sumber : Data Olahan Penelitian, 2019

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui responden penelitian Laki-laki sebanyak 31 orang, dan selanjutnya untuk responden perempuan berjumlah 9 orang. Kemudian untuk penggolongan responden penelitian selajutnya berdasarkan umur yang mana dapat dilihat pada tabel dibawa ini :

Tabel V.2. Klasifikasi Responden Penelitian Berdasarkan Umur.

No	Umur	Jumlah Responden	Persentase
1	≤ 25 tahun	-	-
2	25-39 tahun	13	33%
3	40-49 tahun	20	51%
4	≥ 50 tahun	7	15%
Jumlah		40	100%

Sumber : Data Olahan Penelitian, 2019

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa responden terbesar adalah antara usia 40-49 tahun dengan jumlah 20 orang atau sekitar 51%, Kemudian usia responden umur 25-39 sebanyak 13 orang atau sekitar 33% dan selebihnya yaitu berusia 50 keatas berjumlah 7 orang atau sekitar 15% dari keseluruhan responden. Kemudian penggolongan responden penelitian berdasarkan pendidikan yang merupakan faktor penilaian pengetahuan responden, yang mana dapat terlihat pada tabel dibawa ini :

Tabel V.3. Klasifikasi Responden Penelitian Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Jenis Kelamin	Jumlah Responden	Persentase
1	SD	-	-
2	SMP	-	-
3	SMA	19	47%
4	Diploma	14	36%
5	Sarjana	6	15%
6	Pasca Sarjana	1	3%
Jumlah		40	100%

Sumber : Data Olahan Penelitian, 2018

Dari data diatas terlihat bahwa tingkat pendidikan responden terbesar adalah diploma sebanyak 14 orang atau sekitar 36% hal ini adalah tingkat pendidikan yang sudah baik dalam melaksanakan kinerjanya secara menyeluruh. Selanjutnya dalam tingkat pendidikan sarjana yang mana berjumlah 6 responden atau sekitar 35%, selanjutnya responden SMA sebanyak 19 responden atau sekitar 26%, selanjutnya responden pasca sarjana sebanyak 1 responden atau sekitar 3% dari keseluruhan jumlah responden.

B. Evaluasi Tugas Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Indragiri Hilir Dalam Pengelolaan Sampah Di Kecamatan Tembilahan

Dalam pelaksanaan kebersihan bebas sampah melalui pengelolaan sampah yang dilaksanakan pemerintah kabupaten Indragiri Hilir melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Indragiri Hilir dalam memberikan pelayanan pengelolaan sampah terhadap masyarakat, pengelolaan sampah berdasarkan tugas Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Indragiri Hilir dengan memberikan pelayanan penanganan sampah secara merata bagi masyarakat di Kecamatan Tembilahan sesuai dengan penetapan kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 20 tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah.

Pelaksanaan tugas Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Indragiri Hilir di Kecamatan Tembilahan dimana telah memberikan kontribusi didalam pengelolaan sampah yang di dasarkan tugas yang ditetapkan. Hal ini dinilai dari tugas Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Indragiri Hilir melakukan penanganan sampah dengan menyediakan tempat penampungan sampah di setiap RT/RW maupun persimpangan jalan dengan tujuan agar sampah tidak dibuat sembarangan dan adanya upaya pengangkutan sampah sesuai dengan waktu yang ditetapkan sehingga sampah tidak mengalami penumpukan. Keberhasil Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Indragiri Hilir dalam pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah tidak terlepas dengan memberikan sosialisasi terhadap masyarakat Kecamatan Tembilahan guna adanya aturan pembuangan sampah dan dampak yang ditimbulkan sampah bila dibuang tidak pada tempatnya, serta adanya upayah Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Indragiri Hilir melakukan pengawasan terhadap masyarakat yang membuang sampah dengan sembarangan dan memberikan sanksi terhadap masyarakat yang melanggar aturan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintahKabupaten Indragiiri hal itu semua bertujuan agar tercapainya hasil kebijakan pengelolaan sampah dengan maksimal adanya sinkronisasi antar pemerintahKabupaten Indragiiri dengan Masyarakat Kecamatan Tembilahan.

Keberhasilan Kebijakan pengelolaan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Indragiri Hilir yang didasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 20 tahun 2011 tentang Pengelolahan Sampah masih mengalami hambatan didalam implementasi kegiatan pengelolaan sampah

dilapangan mulai dari penanganan pengangkutan penyediaan sarana prasarana hal ini penyediaan bak sampah belum dilakukan secara merata di setiap RT, belum dilakukannya secara merata sosialisasi terkait upaya pengelolaan sampah, belum dilakukannya secara merata pembinaan yang diberikan bagi masyarakat didalam penanganan sampah secara bersama, dan belum terlihat adanya kerjasama Dinas dengan masyarakat, serta belum adanya pengawasan yang maksimal oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Indragiri Hilir sehingga sampah masih terlihat berserakan tidak dibuang pada tempatnya.

Untuk Mengetahui Pelaksanaan Tugas Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Indragiri Hilir Dalam Pengelolaan Sampah Di Kecamatan Tembilahan yang didasarkan indikator Efektivitas, Efisiensi, Kecukupan, Perataan, Responsivitas, Ketepatan sebagai berikut :

1. Efektivitas

Efektivitas adalah pencapaian tujuan secara tepat dengan tujuan-tujuan yang tepat dan terarahnya kebijakan yang dibuat sesuai dengan tujuan dan fungsinya. Dengan pengertian efektivitas seperti itu maka dalam Pelaksanaan Tugas Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Indragiri Hilir Dalam Pengelolaan Sampah Di Kecamatan Tembilahan tentunya harapan dan aspek ketepatan dan arahan kebijakan ke sasaran yang diinginkan dapat dicapai. Sejalan dengan itu guna mengetahui efektivitas Pelaksanaan Tugas Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Indragiri Hilir Dalam Pengelolaan Sampah Di Kecamatan Tembilahan penulis menetapkan 3 item penilaian yaitu :

1. Melakukan penetapan Peraturan.
2. Melakukan sosialisasi bentuk penanganan sampah.
3. Melakukan pengawasan Sampah.

Untuk lebih jelasnya, hasil tanggapan responden dalam Pelaksanaan Tugas Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Indragiri Hilir dalam Pengelolaan Sampah di Kecamatan Tembilahan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel V.4. Penilaian Jawaban Responden Mengenai Indikator Efektivitas dalam pelaksanaan Tugas Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Indragiri Hilir dalam Pengelolaan Sampah di Kecamatan Tembilahan.

No	Item Penilaian	Katagori Penilaian			Jumlah
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Kurang Terlaksana	
1	Melakukan Penetapan Peraturan.	6 (16%)	29 (76%)	3 (8%)	38
2	Melakukan Sosialisasi bentuk penanganan sampah.	8 (21%)	25 (65%)	5 (13%)	38
3	Melakukan Pengawasan.	7 (18%)	20 (53%)	11 (29%)	38
Jumlah		21	74	19	114
Rata-Rata		7	25	6	38
Persentase		18%	66%	16%	100%

Sumber : Olahan Data Penelitian, 2019

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa untuk indikator Efektivitas dalam item penilaian pelaksanaan Tugas Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Indragiri Hilir dalam Pengelolaan Sampah di Kecamatan Tembilahan yang menjawab terlaksana sebanyak 6 responden atau (16%) dengan alasan, Melakukan Penetapan Peraturan pengelolaan sampah di tengah masyarakat.. Selanjutnya untuk responden yang menjawab cukup terlaksana sebanyak 29 responden atau 76% dengan alasan, melakukan Penetapan Peraturan pengelolaan

sampah di tengah masyarakat akan tetapi peraturan secara luas belum dilaksanakan didalam pengelolaan sampah mulai dari waktu pengangkutan dan penumpukan.. Selanjutnya untuk responden yang menjawab kurang terlaksana sebanyak 3 responden atau 8 % dengan alasan, diketahui melakukan Penetapan Peraturan pengelolaan sampah belum terlaksana dengan baik dimana ketetapan peraturan pengelolaan sampah belum diterapkan hal ini dapat dilihat pada pengelolaan sampah mulai dari waktu pengangkutan hingga penumpukan.

Kemudian untuk item penilaian Pelaksanaan sosialisasi bentuk penanganan sampah yang mana responden penelitian Pelaksanaan Tugas Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Indragiri Hilir Dalam Pengelolaan Sampah Di Kecamatan Tembilahan yang menyatakan terlaksana 8 responden atau 21% dengan alasan, Pelaksanaan sosialisasi bentuk penanganan sampah di kecamatan tembilahan sudah dilakukan. Selanjutnya untuk responden yang menjawab cukup terlaksana sebanyak 25 responden atau 65% dengan alasan, Pelaksanaan sosialisasi bentuk penanganan sampahnya sudah dilakukan di tengah masyarakat akan tetapi sosialisasi yang diberikan hanya bagi segelintiran masyarakat tertentu atara lain RT/RW melainkan tidak bagi masyarakat pada umumnya yang secara langsung di tengah masyarakat. Selanjutnya untuk responden yang menjawab kurang terlaksana sebanyak 5 responden atau 13% dengan alasan, belum terlaksana dengan baik dimana diketahui bahwa banyak masyarakat yang belum mengetahui akan penanganan sampah yang berdasarkan aturan yang berlaku.

Kemudian untuk item penilaian melakukan pengawasan yang mana responden penelitian pada berdasarkan Pelaksanaan Tugas Dinas Lingkungan

Hidup Dan Kebersihan Indragiri Hilir Dalam Pengelolaan Sampah Di Kecamatan Tembilahan yang menyatakan terlaksana berjumlah 7 responden atau 18% dengan alasan, melakukan pengawasan didalam penagan sampah di tegah masyarakat. Selanjutnya untuk responden yang menjawab cukup terlaksana sebanyak 20 responden atau 53% dengan alasan, melakukan pengawasan sampah ditegah masyarakat sudah dilakukan akan tetapi pengawasan yang dilakukan didaat jam pengangkutan sampah yang seharusnya pengawasan dapat dilakukan di setiap hari secara langsung dilokasi titik penampungan sampah. Selanjutnya untuk responden yang menjawab kurang terlaksana sebanyak 11 responden atau 29% dengan alasan, melakukan pengawasan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Indragiri hilir belum diterapkan dengan baik hal ini pengawasan yang dilakukan hanya apabila adanya pengangkutan sampah sehingga Pihak Dinas tidak mengetahui secara luas bagi masyarakat yang membeuang sampah tidak pada tempatnya.

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa tanggapan atau jawaban responden penelitian mengenai Efektivitas melalui Pelaksanaan Tugas Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Indragiri Hilir Dalam Pengelolaan Sampah Di Kecamatan Tembilahan dalam katagori cukup terlaksana, kata gori cukup terlaksana dengan nilai responden 25 atau 66% dengan alasan, Pelaksanaan pengelolaan sampah berdasarkan peraturan yang ditetapkan belum dapat diterpkan dengan baik terutama didalam pengelolaan sampah mulai dari waktu pengakutan sampah sampai dengan penampunga sampah belum sesuai dengan waktu yang ditetapkan yaitu pegangkutan sampah 5 kali dalam seminggu melainkan dalam 3

kali dalam seminggu, serta belum dilakukannya sosialisasi secara merata bagi masyarakat terkait pengelolaan sampah dengan masyarakat, belum adanya ketetapan waktu pengawasan yang rutin yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Indragiri Hilir sehingga masih ditemuinya masyarakat yang melakukan pembuangan sampah tidak pada tempatnya. Hal ini dapat diketahui melalui item penilaian Melakukan Penetapan Peraturan, Melakukan Sosialisasi bentuk penanganan sampah, Melakukan Pengangkutan sampah.

Berikut hasil wawancara dengan Ibu Rahayu Ningsi sebagai Kepala Bidang Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Indragiri dalam pengelolaan sampah tanggal 9 September 2019 sebagai berikut:

“... Se jauh ini didalam Pelaksanaan Tugas Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Indragiri Hilir Dalam Pengelolaan Sampah Di Kecamatan Tembilahan sudah dilakukannya sosialisasi penetapan peraturan pengelolaan sampah di tengah masyarakat, meskipun belum berlangsung dan pengawasan sampah dengan baik dikarenakan kurangnya petugas kebersihan didalam memberikan sosialisasi secara merata bagi masyarakat melainkan hanya sebagian RT/RW sehingga upaya didalam pengelolaan sampah belum maksimal akan tetapi kami selalu berupaya agar sosialisasinya, penetapan peraturan dan pengawasan sampah dapat terlaksana dengan baik....”

Berikut hasil wawancara dengan Bapak Novan Serwanto sebagai Kepala Seksi Penanganan dan Pemrosesan Akhir Sampah Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Indragiri Hilir dalam pengelolaan sampah tanggal 9 September 2019 sebagai berikut:

“... Se jauh kami sudah melakukan sosialisasi penetapan peraturan pengelolaan sampah di tengah masyarakat, akan tetapi belum terlaksana secara merata dikarenakan kurangnya jumlah petugas secara khusus memberikan sosialisasi akan tetapi kami berupaya memberikan sosialisasi bagi masyarakat didalam bentuk baliho di lokasi penampungan sampah...”

Dari observasi yang penulis lakukan dapat diketahui bahwa Pelaksanaan Tugas Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Indragiri Hilir Dalam Pengelolaan Sampah Di Kecamatan Tembilahan belum adanya sosialisasi terkait peraturan dan jadwal pengangkutan sampah yaitu pengangkutan sampah 5 kali dalam seminggu melainkan kenyataannya 3 kali dalam seminggu.

Berdasarkan hasil Kuesioner, wawancara dan Observasi penulis menganalisa bahwa Pelaksanaan Tugas Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Indragiri Hilir Dalam Pengelolaan Sampah di Kecamatan Tembilahan Pelaksanaan pengelolaan sampah berdasarkan peraturan yang ditetapkan belum dapat diterapkan dengan baik terutama didalam pengelolaan sampah mulai dari waktu pengangkutan sampah sampai dengan penampungan sampah belum sesuai dengan waktu yang ditetapkan yaitu pengangkutan sampah 5 kali dalam seminggu melainkan dalam 3 kali dalam seminggu, serta belum dilakukannya sosialisasi secara merata bagi masyarakat terkait pengelolaan sampah dengan masyarakat, belum adanya ketetapan waktu pengawasan yang rutin yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Indragiri Hilir sehingga masih ditemuinya masyarakat yang melakukan pembuangan sampah tidak pada tempatnya. Hal ini dapat diketahui melalui item penilaian Melakukan Penetapan Peraturan, Melakukan Sosialisasi bentuk penanganan sampah, Melakukan Pengangkutan sampah. Sehingga dapat dikatakan Pelaksanaan Tugas Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Indragiri Hilir Dalam Pengelolaan Sampah Di Kecamatan Tembilahan dalam katagori Cukup Terlaksana.

2. Efisiensi

Efisiensi yaitu usaha pencapaian hasil yang digunakan secara optimal yang dicapai dengan penggunaan sumber daya yang ada yang berdasarkan tugas dan fungsi yang telah ditetapkan. Dengan pengertian efisiensi seperti itu maka dalam Pelaksanaan Tugas Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Indragiri Hilir Dalam Pengelolaan Sampah Di Kecamatan Tembilahantentunya harapan dan aspek ketepatan dan arahan kebijakan ke sasaran yang diinginkan dapat dicapai. Sejalan dengan itu guna mengetahui efisiensi pelaksanaan Pelaksanaan Tugas Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Indragiri Hilir Dalam Pengelolaan Sampah Di Kecamatan Tembilahanpenulis menetapkan 3 item penilaian yaitu :

1. Pengawasan langsung.
2. Pengarahan terhadap masyarakat.
3. Pencapaian kebersihan sampah.

Untuk lebih jelasnya, hasil tanggapan responden dalam Evaluasi Pelaksanaan Tugas Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Indragiri Hilir Dalam Pengelolaan Sampah Di Kecamatan Tembilahandapat dilihat pada tabel dibawa ini :

Tabel V.5. Penilaian Jawaban Responden Mengenai Indikator Efisiensi Dalam Pelaksanaan Tugas Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Indragiri Hilir Dalam Pengelolaan Sampah Di Kecamatan Tembilahan.

No	Item Penilaian	Katagori Penilaian			Jumlah
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Kurang Terlaksan	
1	Pengawasan langsung.	6 (15%)	26 (68%)	6 (16%)	38
2	Pengarahan terhadap masvarakat.	5 (13%)	25 (66%)	8 (21%)	38

1	2	3	4	5	6
3	Pencapaian kebersihan sampah .	5 (13%)	24 (63%)	9 (24%)	38
Jumlah		16	75	23	114
Rata-rata		5	25	8	38
Persentase		13%	66%	21%	100%

Sumber : Olahan Data Penelitian, 2019

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa untuk indikator Efisiensi dalam item penilaian Pengawasan langsung didaam Pelaksanaan Tugas Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Indragiri Hilir Dalam Pengelolaan Sampah Di Kecamatan Tembilahan yang menjawab terlaksana sebanyak 6 responden atau (15%) dengan alasan, Pengawasan langsung dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Indragiri Hilir dengan tujuan agar tidak terjadinya pembuangan sampah sembarangan. Selanjutnya untuk responden yang menjawab cukup terlaksana sebanyak 26 responden atau 68% dengan alasan, Pengawasan langsung dalam penanganan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Indragiri Hilir sudah terlaksana akan tetapi pengawasan yang dilakukan belum secara merata atau adanya waktu pengawasan yang telah ditetntukan melainkan apabila adanya penumpukan pembuangan sampah tidak pada tempatnya. Selanjutnya untuk responden yang menjawab kurang terlaksana sebanyak 6 responden atau 16% dengan alasan, Pengawasan secara langsung oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Indragiri Hilir dalam pengelolaan sampah belum terlaksana dengan baik dimana masih terlihat pembuangan sampah tidak pada tempatnya.

Kemudian untuk item penilaian Pengarahan terhadap masyarakat yang mana responden penelitian Pelaksanaan Tugas Dinas Lingkungan Hidup dan

Kebersihan Indragiri Hilir Dalam Pengelolaan Sampah Di Kecamatan Tembilahan yang menyatakan terlaksana berjumlah 5 responden atau 13 % dengan alasan, Pengarahan terhadap masyarakat sudah dilakukan didalam pengarahan pembuangan sampah pada tempatnya. Selanjutnya untuk responden yang menjawab cukup terlaksana sebanyak 25 responden atau 66% dengan alasan, Pengarahan terhadap masyarakat sudah dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Indragiri Hilir akan tetapi pengarahan yang diberikan hanya sekedar upayah pembuangan sampah pada tempatnya melainkan tidak upayah penangulangan sampah oleh masyarakat. Selanjutnya untuk responden yang menjawab kurang terlaksana sebanyak 8 responden atau 21% dengan alasan, Pengarahan terhadap masyarakat oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Indragiri Hilir belum terlaksana secara merata sehingga banyak masyarakat yang belum diarahkan mengetai tertib pembuangan sampah.

Kemudian untuk item penilaian Pencapaian kebersihan sampah yang mana responden penelitian Pelaksanaan Tugas Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Indragiri Hilir Dalam Pengelolaan Sampah Di Kecamatan Tembilahan yang menyatakan terlaksana berjumlah 5 responden atau 13% dengan alasan, Pencapaian kebersihan sampah sudah terlaksana dimana adanya pengangkutan kebersihan sampah. Selanjutnya untuk responden yang menjawab cukup terlaksana sebanyak 26 responden atau 68% dengan alasan, Pencapaian kebersihan sampah sudah dilaksanakan ooleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Indragiri Hilirakan tetapi pencapaian kebersihan sampah belum dapat dirasakan masyarakat secara menyeluruh dikarenakan masih banyak

sampah yang berserakan dan belum adanya tindakan ataupun upaya Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Indragiri Hilir dalam penanganan sampah tersebut. Selanjutnya untuk responden yang menjawab kurang terlaksana sebanyak 9 responden atau 24% dengan alasan, Penertiban pembuangan sampah belum terlaksana dengan baik oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Indragiri Hilir sehingga masih banyak sampah ditemui berserakan tidak pada tempatnya.

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa tanggapan atau jawaban responden penelitian mengenai efisiensi Pelaksanaan Tugas Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Indragiri Hilir Dalam Pengelolaan Sampah Di Kecamatan Tembilahan dalam katagori cukup terlaksana, Pelaksanaan Tugas Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Indragiri Hilir Dalam Pengelolaan Sampah Di Kecamatan Tembilahan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Indragiri Hilir belum melakukan penagwasan secara langsung agar sampah tidak dibuang masyarakat begitu saja sehingga ada solusi yang akan dilakukan Dinas Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Indragiri Hilir dalam penanggulangannya, serta kurangnya pengarahan akan tertibnya pembuangan sampah sehingga sampah tidak dibuang begitu saja melainkan dibuang pada tempat yang telah disediakan. Hal ini didapatkan dari hasil tanggapan responden yang menanyakan Efisiensi melalui Pengawasan langsung, Pengarahan terhadap masyarakat, Pencapaian kebersihan sampah.

Berikut hasil wawancara dengan Ibu Rahayu Ningsi sebagai Kepala Bidang Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten

Indragiri Hilir dalam pengelolaan sampah tanggal 9 September 2019 sebagai berikut

“... sejauh ini pelaksanaan pengelolaan sampah melalui pengawasan sampah ditegah-tengah masyarakat sudah kami lakukan saya menggerakkan bawahan saya didalam melakukan pengawasan di lingkungan masyarakat, meskipun sejauh ini pencapaian kebersihan sampah masih terlihat ada bedibuang tidak pada tempatnya hal ini dikarenakan kurangnya antusias masyarakat membuang sampah pada tempatnya dengan alasan-alasan tertentu sehingga kami mengalami kesulitan didalam penagannya akan saya selalu himbau terhadap para petugas dilapangan agar selalu berusaha memberikan pengarahan bagi warga dengan tujuan sampah dibuat pada tempat bak sampah yang telah disediakan.....”

Berikut hasil wawancara dengan Bapak Novan Serwanto sebagai Kepala Seksi Penanganan dan Pemrosesan Akhir Sampah Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Indragiri Hilir dalam pengelolaan sampah tanggal 9 September 2019 sebagai berikut:

“... Sejahter pelaksanaan pengawasan yang kami lakukan sudah terlaksana dengan memberikan himbauan ditegah masyarakat melalui RT,RW setempat meskipun kami tidak bisa secara langsung mendatangi rumah warga satu persatu tetapi kami berupaya apabila ketetapan sampah dibuang tidak pada tempatnya kami memberikan himbauan bagi masyarakat disekitarnya, pengawasan yang kami lakukan sebagai petugas dilapangan terlihat belum maksimal dikarenakan banyaknya yang harus kami awasi...”

Dari observasi yang penulis lakukan dapat diketahui bahwa Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Indragiri Hilir Dalam Pengelolaan Sampah Di Kecamatan Tembilahan belum diterapkannya pengawasan secara langsung agar sampah tidak dibuang masyarakat begitu saja dan terlihat kurangnya pengarahan

akan tertibnya pembuangan sampah sehingga sampah dibuang begitu saja tidak pada tempatnya.

Berdasarkan hasil Kuesioner, Wawancara dan Observasi penulis menganalisa bahwa Pelaksanaan Tugas Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Indragiri Hilir Dalam Pengelolaan Sampah Di Kecamatan Tembilahan bahwa Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Indragiri Hilir belum melakukan penagwasan secara langsung agar sampah tidak dibuang masyarakat begitu saja sehingga ada solusi yang akan dilakukan dalam penanggulangannya, serta kurangnya pengarahan akan tertibnya pembuangan sampah sehingga sampah tidak dibuang begitu saja melainkan dibuang pada tempat yang telah disediakan. Hal ini dapat diketahui melalui item penilaian Pengawasan langsung, Pengarahan terhadap masyarakat, Pencapaian kebersihan sampah Sehingga dapat dikatakan Pelaksanaan Tugas Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Indragiri Hilir Dalam Pengelolaan Sampah Di Kecamatan Tembilahan dalam katagori Cukup Terlaksana

3. Kecukupan

Kecukupan yaitu kebijakan dalam pelaksanaan dalam program dan peraturan yang ditetapkan antara kerjasama kinerja organisasi dalam pencapaian tujuan. Dengan pengertian kecukupan seperti itu maka dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 20 tahun 2011 tentang pengelolaan sampah tentunya harapan dan aspek ketepatan dan arahan kebijakan ke sasaran yang diinginkan dapat dicapai. Sejalan dengan itu guna mengetahui kecukupan Pelaksanaan Tugas Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Indragiri Hilir

Dalam Pengelolaan Sampah Di Kecamatan Tembilihan penulis menetapkan 3 item penilaian yaitu :

1. Kerjasama atasan dengan bawahan.
2. Kerjasama pegawai.
3. Kerjasama dengan masyarakat

Untuk lebih jelasnya, hasil tanggapan responden dalam Pelaksanaan Tugas Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Indragiri Hilir Dalam Pengelolaan Sampah Di Kecamatan Tembilihan dapat dilihat pada tabel dibawa ini :

Tabel V.6. Penilaian Jawaban Responden Mengenai Indikator Kecukupan Dalam Pelaksanaan Tugas Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Indragiri Hilir Dalam Pengelolaan Sampah Di Kecamatan Tembilihan.

No	Item Penilaian	Katagori Penilaian			Jumlah
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Kurang Terlaksana	
1	Kerjasama antara atasan dan bawahan.	8 (21%)	26 (68%)	4 (11%)	38
2	Kerjasama pegawai.	12 (31%)	25 (66%)	6 (16%)	38
3	Kerjasama dengan masyarakat.	7 (18%)	24 (63%)	7 (18%)	38
Jumlah		27	70	17	114
Rata-rata		9	23	6	38
Persentase		24%	60%	16%	100%

Sumber : Olahan Data Penelitian, 2018

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa untuk indikator Kecukupan dalam item penilaian Kerjasama antara atasan dan bawahan responden penelitian Pelaksanaan Tugas Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Indragiri Hilir Dalam Pengelolaan Sampah Di Kecamatan Tembilihan yang menjawab terlaksana sebanyak 8 responden atau (21%) dengan alasan, Kerjasama antara atasan dan bawahan dalam melaksanakan tugasnya sudah terlaksana dalam

penetapan pengelolaan sampah. Selanjutnya untuk responden yang menjawab cukup terlaksana sebanyak 26 responden atau 68% dengan alasan, Kerjasama antara atasan dan bawahan sudah terlaksana mulai dari penagkutan sampah sampai dengan pengeloolan sampah akan tetapi terlihat belum adanya himbauan dari atasan terkait pencapaian bawahan agar lebih maksimal didalam melaksanakan kinerja. Selanjutnya untuk responden yang menjawab kurang terlaksana sebanyak 4 responden atau 11% dengan alasan, Kerjasama antara atasan dan bawahan belum terlihat maksimaakan tidak pada tempatnya.

Kemudian untuk item penilaian Kerjasama pegawai yang mana responden penelitian Pelaksanaan Tugas Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Indragiri Hilir Dalam Pengelolaan Sampah Di Kecamatan Tembilahan yang menyatakan terlaksana berjumlah 12 responden atau 31 % dengan alasan, Kerjasama pegawai sudah terlihat bekerjasama didalam melaksanakan penanganan sampah Selanjutnya untuk responden yang menjawab cukup terlaksana sebanyak 25 responden atau 66% dengan alasan, Kerjasama pegawai sudah berlangsung sesuai dengan tugasnya akan tetapi kerjasam pegawai belum memberikan hasil yang maksimal didalam penanganan sampa dimana terlihat bahwa kurangnya jumlah pegawai dilapangan didalam penangan sampah. Selanjutnya untuk responden yang menjawab kurang terlaksana sebanyak 6 responden atau 16% dengan alasan, Kerjasama pegawai belum memberikan hasil yang maksimal dimana masih sedikitnya pengawai dilapangan didalam penangan sampah sehingga sampah masih dibuang oleh masyarakat tidak pada tempatnya.

Kemudian untuk item penilaian Kerjasama dengan masyarakat yang mana responden penelitian pada berdasarkan Pelaksanaan Tugas Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Indragiri Hilir Dalam Pengelolaan Sampah Di Kecamatan Tembilahan yang menyatakan terlaksana berjumlah 7 responden atau 18% dengan alasan, Kerjasama dengan masyarakat oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Indragiri Hilir sudah terlaksana melalui adanya himbauan pengarahannya terkait penanganan sampah di tengah masyarakat. Selanjutnya untuk responden yang menjawab cukup terlaksana sebanyak 24 responden atau 63% dengan alasan, Kerjasama dengan masyarakat oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Indragiri Hilir sudah terlaksana akan tetapi kerjasama yang dilakukan hanyalah sebatas upaya pembuangan sampah oleh masyarakat ditempat bak sampah yang telah disediakan melainkan tidak adanya kerjasama dalam bentuk himbauan bagi masyarakat yang tidak membuang sampah pada tempatnya. Selanjutnya untuk responden yang menjawab kurang terlaksana sebanyak 7 responden atau 18% dengan alasan, kerjasama Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Indragiri Hilir terhadap masyarakat didalam penanganan sampah hanya bentuk upaya pembuangan sampah pada tempatnya melainkan tidak mengarah himbauan bagi masyarakat yang melakukan pembuangan sampah tidak pada tempatnya.

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa tanggapan atau jawaban responden penelitian mengenai Kecukupan melalui Pelaksanaan Tugas Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Indragiri Hilir Dalam Pengelolaan Sampah Di Kecamatan Tembilahan dalam kategori cukup terlaksana, kategori cukup

terlaksana dengan nilai responden 23 atau 60% dengan alasan Pelaksanaan Tugas Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Indragiri Hilir Dalam Pengelolaan Sampah Di Kecamatan Tembilahan melalui kerjasam antara atasan dan bawahan, sesama pegawai dan masyarakat belum berlangsung baik terutama antara atasan dan pegawai dimana belum adanya evaluasi hasil kinerja didalam penanganan sampah sehingga dilapangan terlihat masih banyak sampah yang berserakan tidak pada tempatnya dan lambatnya pengangkutan sampah hal ini dikarenakan sedikitnya pegawai yang ikut serta dilapangan, serta kurangnya kerjasama dengan masyarakat terutama terkait himbauan bagi masyarakat lain yang membuang sampah tidak pada tempatnya sehingga terlihat belum memberikan dampak keberhasilan terhadap kebijakan yang ditetapkan. Hal ini didapatkan dari hasil tanggapan responden yang menanyakan Efisiensi dalam Pelaksanaan Tugas Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Indragiri Hilir Dalam Pengelolaan Sampah Di Kecamatan Tembilahan melalui Kerjasama atasan dengan bawahan, Kerjasama pegawai, Kerjasama dengan masyarakat.

Berikut hasil wawancara dengan Ibu Rahayu Ningsi sebagai Kepala Bidang Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Indragiri Hilir dalam pengelolaan sampah tanggal 9 September 2019 sebagai berikut:

“....Sejauh ini Pelaksanaan Tugas Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Indragiri Hilir Dalam Pengelolaan Sampah Di Kecamatan Tembilahan saya sebagai atasan saya sudah melakukan kerjasama atasan dengan bawahan, antar pegawai dan masyarakat hal ini bertujuan agar tercapaian pengelolaan sampah mulai dari lingkungan masyarakat, pengangkutan sampai dengan lokasi pembuangan sampah akhir meskipun terlihat belum adanya kerjasama solit akan tetapi kita selalu berupaya

bekerjasama didalam penanganan sampah mulai dari pencapaian tugas sampai dengan evaluasi kinerja pegawai dan himbauan bagi masyarakat terkait upaya pembuangan sampah pada tempatnya....”

Berikut hasil wawancara dengan Bapak Novan Serwanto sebagai Kepala Seksi Penanganan dan Pemrosesan Akhir Sampah Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Indragiri Hilir dalam pengelolaan sampah tanggal 9 September 2019 sebagai berikut:

“... Pelaksanaan pegelolaan sampah melalui kerjasama dengan atasan dan masyarakat sudah terlaksana akan tetapi kerjasama terlihat belum memberikan motivasi terutama atasan terhadap bawahan dikarenakan atasan cenderung hanya himbauan bagi bawasan yang seharusnya atasan dapat melihat perkembangan pengelolaan sampah mulai dari masyarakat sampai ke TPA, sehingga kami sebagai bawahan masih mengalami kelallaian didalam penangan sampah dilapangan hal ini dikarenakan kurangnya kerjasama atasan terkait keikut sertaan penanganan sampah dilapangan, sehingga atasan tidak mengetahui apa yang menjadi kendala dan pembenahan dilapangan, begitu juga masyarakat masih banyak kurangnya antusias didalam kebersihan lingkungan sehingga kerjasama yang terjalin belum memberikan dampak didalam penaganan sampah dengan baik....”

Dari observasi yang penulis lakukan dapat diketahui bahwa Pelaksanaan Pengelolaan Sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Indragiri Hilir terlihat belum adanya kerjasam yang solit atasan dan bawahan hal ini dikarenakan atasan belum memberikan instruksi secara langsung terkait bentuk-bentu dan upaya penangan sampah mulai dari waktu pengkutan dari masyarakat sampai dengan penampungan akhir sampah, dan kurangnya kerjasama dengan masyarakat terutama terkait himbauan bagi masyarakat lain agar melakukan pembuangan sampah pada tempatnya.

Berdasarkan hasil Kuesioner, wawancara dan Observasi penulis menganalisa bahwa Pelaksanaan Tugas Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Indragiri Hilir Dalam Pengelolaan Sampah Di Kecamatan Tembilahan bahwa kerjasama antara atasan dan bawahan, sesama pegawai dan masyarakat belum berlangsung baik terutama antara atasan dan pegawai dimana belum adanya evaluasi hasil kinerja didalam penanganan sampah sehingga dilapangan terlihat masih banyak sampah yang berserakan tidak pada tempatnya dan lambatnya pengangkutan sampah hal ini dikarenakan sedikitnya pegawai yang ikut serta dilapangan, serta kurangnya kerjasama dengan masyarakat terutama terkait himbauan bagi masyarakat lain yang membuang sampah tidak pada tempatnya sehingga terlihat belum memberikan dampak keberhasilan terhadap kebijakan yang ditetapkan. Hal ini dapat diketahui melalui item penilaian Kerjasama atasan dengan bawahan, Kerjasama pegawai, Kerjasama dengan masyarakat sehingga dapat dikatakan Pelaksanaan Tugas Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Indragiri Hilir Dalam Pengelolaan Sampah Di Kecamatan Tembilahan dalam katagori Cukup Terlaksana.

4. Perataan

Perataan adalah pemberian pencapaian hasil kebijakan terhadap organisasi maupun lingkungan secara menyeluru berdasarkan tugas dan fungsinya. Dengan pengertian perataan seperti itu maka dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 20 tahun 2011 tentang pengelolaan sampah tentunya harapan dan aspek ketepatan dan arahan kebijakan ke sasaran yang diinginkan dapat dicapai. Sejalan dengan itu guna mengetahui perataan

Pelaksanaan Tugas Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Indragiri Hilir Dalam Pengelolaan Sampah Di Kecamatan Tembilahan penulis menetapkan 3 item penilaian yaitu :

1. Penetapan waktu pengangkutan Sampah.
2. Penyediaan Bak Sampah.
3. Pemberian Sanksi.

Untuk lebih jelasnya, hasil tanggapan responden dalam Pelaksanaan Tugas Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Indragiri Hilir Dalam Pengelolaan Sampah Di Kecamatan Tembilahan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel V.7. Penilaian Jawaban Responden Mengenai Indikator Perataan Dalam Pelaksanaan Tugas Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Indragiri Hilir Dalam Pengelolaan Sampah Di Kecamatan Tembilahan.

No	Item Penilaian	Katagori Penilaian			Jumlah
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Kurang Terlaksana	
1	Penetapan waktu pengangkutan Sampah.	7 (18%)	23 (61%)	8 (21%)	38
2	Penyediaan Bak Sampah.	8 (21%)	27 (71%)	3 (7%)	38
3	Pemberian Sanksi.	10 (26%)	20 (52%)	8 (21%)	38
Jumlah		25	70	19	114
Rata-rata		9	23	6	38
Persentase		23%	61%	16%	100%

Sumber : Olahan Data Penelitian, 2019

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa untuk indikator Perataan dalam item penilaian Penetapan waktu pengangkutan Sampah dimana responden penelitian Pelaksanaan Tugas Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Indragiri Hilir Dalam Pengelolaan Sampah Di Kecamatan Tembilahan yang menjawab

terlaksana sebanyak 7 responden atau (18%) dengan alasan, Penetapan waktu pengangkutan Sampah dilaksanakan di setiap 2 hari. Selanjutnya untuk responden yang menjawab cukup terlaksana sebanyak 23 responden atau 61% dengan alasan Penetapan waktu pengangkutan Sampah sudah terlaksana akan tetapi pengangkutan sampah belum sesuai dengan waktu yang ditetapkan dimana yang terjadi pengangkutan sampai dilakukan seminggu 2 kali sehingga sampah banyak bertumpuk dan berserakan. Selanjutnya untuk responden yang menjawab kurang terlaksana sebanyak 8 responden atau 21% dengan alasan, Penetapan waktu pengangkutan Sampah belum berlangsung baik dimana pengangkutan sampah dilakukan seminggu 2 kali sehingga banyak sampah yang bertumpuk dan berserakan.

Kemudian untuk item penilaian Penyediaan Bak Sampah yang mana responden penelitian Pelaksanaan Tugas Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Indragiri Hilir Dalam Pengelolaan Sampah Di Kecamatan Tembilahan yang menyatakan terlaksana berjumlah 8 responden atau 21% dengan alasan, Penyediaan Bak Sampah sudah dilakukan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan didalam pengelolaan sampah. Selanjutnya untuk responden yang menjawab cukup terlaksana sebanyak 27 responden atau 71% dengan alasan, Penyediaan Bak Sampah belum secara merata disediakan terutama di setiap RT dan persimpangan jalan sehingga banyak masyarakat membuang sampah tidak pada tempatnya. Selanjutnya untuk responden yang menjawab kurang terlaksana sebanyak 3 responden atau 7% dengan alasan, Penyediaan Bak Sampah belum

berlangsung dengan baik dimana penyediaan bak sampah masih terbatas sehingga sampah masih terlihat berserakan dan tidak dibuang pada tempatnya.

Kemudian untuk item penilaian Pemberian Sanksi yang mana responden penelitian Pelaksanaan Tugas Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Indragiri Hilir Dalam Pengelolaan Sampah Di Kecamatan Tembilihan yang menyatakan berjumlah 10 responden atau 26 % dengan alasan, Pemberian Sanksi sudah diberikan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Indragiri Hilir melalui sanksi pengarahan hingga himbauan. Selanjutnya untuk responden yang menjawab cukup terlaksana sebanyak 20 responden atau 52% dengan alasan, Pemberian Sanksi sudah dilakukan akan tetapi sanksi yang diberikan hanya sekedar himbauan saja sehingga tidak masyarakat yang membuang sampah sembarangan tidak mengalami efek jera serta pemberian sanksi tidak dilakukan secara merata yang cenderung hanya pembiaran saja. Selanjutnya untuk responden yang menjawab kurang terlaksana sebanyak 8 responden atau 21% dengan alasan, Pemberian Sanksi belum terlaksana dengan baik melainkan pemberian sanksi yang diberikan hanya himbauan saja sehingga masyarakat tidak merasakan efek jera agar tidak membuang sampah sembarangan.

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa tanggapan atau jawaban responden penelitian mengenai perataan melalui Pelaksanaan Tugas Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Indragiri Hilir Dalam Pengelolaan Sampah Di Kecamatan Tembilihan dalam katagori dengan katagori cukup terlaksana dengan nilai responden 23 atau 61% dengan alasan, Pelaksanaan Tugas Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Indragiri Hilir Dalam Pengelolaan Sampah Di

Kecamatan Tembilahan belum terlaksanakannya ketepatan waktu didalam pengangkutan sampah, serta belum mertanya bak sampah yang diberikan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Indragiri Hilir di setiap RT maupun persimpangan jalan umum sehingga banyak sampah dibuat tidak tepat pada tempatnya serta belum adanya sanksi tegas yang diberikan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Indragiri Hilir bagi setiap yang melakukan pembuangan sampah sembarangan. Hal ini didapatkan dari hasil tanggapan responden yang menanyakan Pelaksanaan Tugas Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Indragiri Hilir Dalam Pengelolaan Sampah Di Kecamatan Tembilahan melalui Penetapan waktu pengangkutan Sampah, Penyediaan Bak Sampah, Pemberian Sanksi.

Berikut hasil wawancara dengan Ibu Rahayu Ningsi sebagai Kepala Bidang Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Indragiri Hilir dalam pengelolaan sampah tanggal 9 September 2019 sebagai berikut:

“... Sejauh ini perataan didalam penanganan sampah dengan melakukan pengangkutan sampah di setiap 2 hari dengan menggunakan mobil cold disel berwarna Kuning yang terdiri dari 1 sopir dan 3 buruh angkut, dan penampungan sampah kami telah menyediakan bak khusus penampungan sampah di setiap RT maupun persimpangan jalan umum, serta memberikan sanksi tegas bagi masyarakat yang melakukan pembuangan sampah sembarangan mulai penahanan identitas sampai dengan pemberian sanksi denda, meskipun didalam penanganan sampah kami masih mengalami kewalahan dikarenakan kurangnya simpati masyarakat akan taat aturan akan tetapi kami selalu berusaha memberikan pelayanan pengangkutan sampah dengan baik...”

Berikut hasil wawancara dengan Bapak Novan Serwanto sebagai Kepala Seksi Penanganan dan Pemrosesan Akhir Sampah Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Indragiri Hilir dalam pengelolaan sampah tanggal 9 September 2019 sebagai berikut:

“...Sejauh ini kami sebagai petugas lapangan didalam pengangkutan sampah masih mengalami kewalahan didalam penangkutan sampah ditegah masyarakat dikarenakan masih ditemuinya sampah berserakan dikarenakan tidak dibuat pada tempatnya dan masih kurangnya Bak sampah yang tersedia sehingga sampah dibuang begitu saja, dan sudah selaknya Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Indragiri Hilir memberikan sanksi tegas bagi masyarakat yang melakukan pembuangan sampah dengan sembarangan....”

Dari observasi yang penulis lakukan dapat diketahui bahwa Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Indragiri Hilir Dalam Pengelolaan Sampah Di Kecamatan Tembilahan belum terlaksanakannya sesuai dengan ketepatan waktu didalam pengangkutan sampah, serta belum mertanya bak penampungan sampah yang disediakan di setiap RT maupun persimpangan jalan umum.

Berdasarkan hasil Kuesioner, wawancara dan Observasi penulis menganalisa bahwa Pelaksanaan Tugas Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Indragiri Hilir Dalam Pengelolaan Sampah Di Kecamatan Tembilahan bahwa belum terlaksanakannya ketepatan waktu didalam pengangkutan sampah, serta belum mertanya bak sampah yang diberikan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Indragiri Hilir di setiap RT maupun persimpangan jalan umum sehingga banyak sampah dibuat tidak tepat pada tempatnya serta belum adanya sanksi tegas yang diberikan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Indragiri Hilir bagi setiap yang melakukan pembuangan sampah

sembarangan. Hal ini dapat diketahui melalui item penilaian Penetapan waktu pengangkutan Sampah, Penyediaan Bak Sampah, Pemberian Sanksi sehingga dapat dikatakan Pelaksanaan Tugas Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Indragiri Hilir Dalam Pengelolaan Sampah Di Kecamatan Tembilahan dalam katagori Cukup Terlaksana

5. Responsivitas

Responsivitas adalah kemampuan birokrasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat, serta melaksanakan mengembangkan program-program sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Dengan pengertian responsivitas seperti itu maka dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 20 tahun 2011 tentang pengelolaan sampah tentunya harapan dan aspek ketepatan dan arahan kebijakan ke sasaran yang diinginkan dapat dicapai. Sejalan dengan itu guna mengetahui responsivitas Pelaksanaan Tugas Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Indragiri Hilir Dalam Pengelolaan Sampah Di Kecamatan Tembilahan penulis menetapkan 3 item penilaian yaitu :

1. Penyediaan Angkutan Sampah.
2. Melakukan penertiban Sampah hingga tingkat RT.
3. Penerimaan keluhan masyarakat.

Untuk lebih jelasnya, hasil tanggapan responden dalam Pelaksanaan Tugas Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Indragiri Hilir Dalam Pengelolaan Sampah Di Kecamatan Tembilahan dapat dilihat pada tabel dibawa ini :

Tabel V.8. Penilaian Jawaban Responden Mengenai Indikator Responsibilitas Dalam Pelaksanaan Tugas Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Indragiri Hilir Dalam Pengelolaan Sampah Di Kecamatan Tembilahan.

No	Item Penilaian	Katagori Penilaian			Jumlah
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Kurang Terlaksana	
1	Penyediaan Angkutan Sampah	7 (18%)	23 (61%)	8 (21%)	38
2	Melakukan penertiban Sampah hingga tingkat RT.	8 (21%)	24 (63%)	6 (16%)	38
3	Penerimaan keluhan masyarakat.	11 (29%)	18 (47%)	8 (21%)	38
Jumlah		26	65	22	114
Rata-rata		9	21	8	38
Persentase		24%	55%	21%	100%

Sumber : Olahan Data Penelitian, 2019

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa untuk indikator Efektivitas dalam item penilaian Penyediaan angkutan sampah dimana responden penelitian Pelaksanaan Tugas Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Indragiri Hilir Dalam Pengelolaan Sampah Di Kecamatan Tembilahan yang menjawab terlaksana sebanyak 9 responden atau (4%) dengan alasan, Penyediaan angkutan sampah sudah disediakan guna mengangkut sampah yang telah terisi di bak sampah. Selanjutnya untuk responden yang menjawab cukup terlaksana sebanyak 23 responden atau 61% dengan alasan Penyediaan Angkutan Sampah sudah disediakan akan tetapi masih kurangnya angkutan sampah yang disediakan sehingga sampah tidak mengalami tumpukan dikarenakan lamanya penagngkutan sampah tersebut. Selanjutnya untuk responden yang menjawab kurang terlaksana sebanyak 8 responden atau 21% dengan alasan, Penyediaan Angkutan Sampah

belum memberikan sumbangan keberhasilan pengangkutan sampah secara maksimal hal ini dikarenakan kurangnya jumlah armada pengangkutan sampah.

Kemudian untuk item penilaian Melakukan penertiban Sampah hingga tingkat RT yang mana responden penelitian berdasarkan Pelaksanaan Tugas Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Indragiri Hilir Dalam Pengelolaan Sampah Di Kecamatan Tembilahan yang menyatakan terlaksana berjumlah 8 responden atau 21% dengan alasan, Melakukan penertiban Sampah hingga tingkat RT sudah dilakukan guna tidak terjadinya penumpukan sampah. Selanjutnya untuk responden yang menjawab cukup terlaksana sebanyak 24 responden atau 63% dengan alasan, Melakukan penertiban Sampah hingga tingkat RT sudah dilakukan akan tetapi belum semua RT dapat ditertibkan sehingga masih ditemuinya sampah berserakan di tingkat RT. Selanjutnya untuk responden yang menjawab kurang terlaksana sebanyak 6 responden atau 16% dengan alasan, Melakukan penertiban Sampah hingga tingkat RT belum terlaksana dengan baik hal ini masih banyak Lokasi sampah yang berserakan di tingkat RT.

Kemudian untuk item penilaian Penerimaan keluhan masyarakat yang mana responden penelitian Pelaksanaan Tugas Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Indragiri Hilir Dalam Pengelolaan Sampah Di Kecamatan Tembilahan yang menyatakan terlaksana berjumlah 11 responden atau 29 % dengan alasan, sejauh ini Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kabupaten Indragiri Hilir sudah menerima keluhan masyarakat dalam penanganan sampah. Selanjutnya untuk responden yang menjawab cukup terlaksana sebanyak 18 responden atau 47% dengan alasan, Penerimaan keluhan masyarakat sudah dilaksanakan akan

tetapi belum adanya peningkatan terkait penanganan sampah di tengah masyarakat. Selanjutnya untuk responden yang menjawab kurang terlaksana sebanyak 8 responden atau 21% dengan alasan, Penerimaan keluhan masyarakat belum secara merata diterima oleh Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kabupaten Indragiri Hilir sehingga apa yang menjadi masalah ditegah masyarakat belum dapat diatasi sehingga kegiatan pengelolaan sampah belum terlaksana dengan baik.

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa tanggapan atau jawaban responden penelitian mengenai Responsivitas melalui Pelaksanaan Tugas Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Indragiri Hilir Dalam Pengelolaan Sampah Di Kecamatan Tembilahan yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kabupaten Indragiri Hilir dalam katagori cukup terlaksana, kata gori cukup terlaksana dengan nilai responden 21 atau 55% dengan alasan, pengelolaan sampah dengan menyediakan angkutan sampah di Kecamatan Tembilahan belum terpenuhinya beban sampah yang ada dengan jumlah armada angkutan yang disediakan dikarenakan banyaknya sampah yang ada sehingga menimbulkan penumpukan sampah, dan terlihat Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kabupaten Indragiri Hilir belum melakukan penertiban sampah sampai ketinggian RT secara menyeluruh sehingga masih banyak ditemui sampah yang bertumpuk tidak pada tempatnya. Hal ini didapatkan dari hasil tanggapan responden yang menanyakan Pelaksanaan Tugas Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Indragiri Hilir Dalam Pengelolaan Sampah Di Kecamatan Tembilahan melalui

Penyediaan Angkutan Sampah, Melakukan penertiban Sampah hingga tingkat RT, Penerimaan keluhan masyarakat.

Berikut hasil wawancara dengan Ibu Rahayu Ningsi sebagai Kepala Bidang Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Indragiri Hilir dalam pengelolaan sampah tanggal 9 September 2019 sebagai berikut:

“...Sejauh ini kami sudah menyediakan angkutan sampah guna pencapaian pengangkutan sampah secara merata sampai ke tingkat RT dan kami juga menerima keluhan yang dirasakan masyarakat terkait didalam penagan sampahn dengan menyediakan Call Center DLHK dengan tujuan masyarakat dapat menghubungi kami agar keluhan masyarakat dalam penanggulangan sampah dapat kami tangani.....”

Berikut hasil wawancara dengan Bapak Novan Serwanto sebagai Kepala Seksi Penanganan dan Pemrosesan Akhir Sampah Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Indragiri Hilir dalam pengelolaan sampah tanggal 9 September 2019 sebagai berikut:

“...Pelaksanaan pengangkutan sampai yang kami lakukan dilapangan bahwa masih kurangnya angkutan sampah didalam pengangkutannya dimana disediakan 1 angkutan Colt Diesel yang seharusnya dapat disediakan 2 angkutan Colt Diesel sehingga sampah tidak bertumpuk sebelum dialkuakn pengangkutan”

Dari observasi yang penulis lakukan dapat diketahui bahwa angkutan sampah diKecamatan Tembilahan belum sesuai dengan beban sampah yang ada dengan jumlah armada sebanyak 1 yang beroperasi sehingga menimbulkan penumpukan sampah.

Berdasarkan hasil Kuesioner, wawancara dan Observasi penulis menganalisa bahwa Pelaksanaan Tugas Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan

Indragiri Hilir Dalam Pengelolaan Sampah Di Kecamatan Tembilahan bahwa pengelolaan sampah dengan menyediakan angkutan sampah di Kecamatan Tembilahan belum terpenuhinya beban sampah yang ada dengan jumlah armada angkutan yang disediakan dikarenakan banyaknya sampah yang ada sehingga menimbulkan penumpukan sampah, dan terlihat Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kabupaten Indragiri Hilir belum melakukan penertiban sampah sampai tingkat RT secara menyeluruh sehingga masih banyak ditemui sampah yang bertumpuk tidak pada tempatnya. Hal ini dapat diketahui melalui item penilaian Penyediaan Angkutan Sampah, Melakukan penertiban Sampah hingga tingkat RT, Penerimaan keluhan masyarakat sehingga dapat dikatakan Pelaksanaan Tugas Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Indragiri Hilir Dalam Pengelolaan Sampah Di Kecamatan Tembilahan dalam katagori Cukup Terlaksana.

6. Ketepatan

Ketepatan yaitu kepastian penerapan yang dilaksanakan dengan kegiatan yang terarah dengan tujuan tercapainya tugas pelaksanaan yang ditetapkan. Dengan pengertian ketepatan seperti itu maka dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 20 tahun 2011 tentang pengelolaan sampah tentunya harapan dan aspek ketepatan dan arahan kebijakan ke sasaran yang diinginkan dapat dicapai. Sejalan dengan itu guna mengetahui ketepatan Pelaksanaan Tugas Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Indragiri Hilir Dalam Pengelolaan Sampah Di Kecamatan Tembilahan penulis menetapkan 3 item penilaian yaitu :

1. Pelayanan pengangkutan Sampah.
2. Memaksimalkan hasil penanganan sampah.
3. Evaluasi hasil penanganan sampah.

Untuk lebih jelasnya, hasil tanggapan responden dalam Pelaksanaan Tugas Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Indragiri Hilir Dalam Pengelolaan Sampah Di Kecamatan Tembilahan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel V.9. Penilaian Jawaban Responden Mengenai Indikator Ketepatan Dalam Pelaksanaan Tugas Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Indragiri Hilir Dalam Pengelolaan Sampah Di Kecamatan Tembilahan.

No	Item Penilaian	Katagori Penilaian			Jumlah
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Kurang Terlaksana	
1	Pelayanan pengangkutan sampah.	7 (18%)	25 (66%)	6 (15%)	38
2	Memaksimalkan hasil penanganan sampah.	8 (21%)	24 (63%)	5 (13%)	38
3	Evaluasi hasil penanganan sampah.	6 (15%)	24 (63%)	8 (21%)	38
Jumlah		21	73	19	114
Rata-rata		7	24	7	38
Persentase		18%	64%	18%	100%

Sumber : Data Olahan Penelitian, 2019

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa untuk indikator Perataan dalam item penilaian Pelayanan pengangkutan sampah responden Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 20 tahun 2011 tentang pengelolaan sampah dimana yang menjawab terlaksana sebanyak 7 responden atau 18% dengan alasan, Pelayanan pengangkutan sampah secara merata. Selanjutnya menjawab cukup terlaksana sebanyak 26 responden atau 66% dengan alasan, Pelayanan pengangkutan sampah sudah terlaksana akan tetapi masih banyak

sampah berserakan di tengah warga yang belum di angkut. Selanjutnya untuk responden yang menjawab kurang terlaksana sebanyak 6 responden atau 15 % dengan alasan, Pelayanan pengangkutan sampah ditegah masyarakat belum terlaksana dengan maksimal dimana masih banyak sampah ditegah masyarakat.

Kemudian untuk item penilaian Memaksimalkan hasil penangan sampah yang mana responden penelitian pada berdasarkan Pelaksanaan Tugas Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Indragiri Hilir Dalam Pengelolaan Sampah Di Kecamatan Tembilihan yang menyatakan terlaksana sebanyak 10 responden atau 38% dengan alasan, Memaksimalkan hasil penangan sampah secara menyeluruh ditengah masyarakat. Selanjutnya untuk responden yang menjawab cukup terlaksana sebanyak 24 responden atau 63% dengan alasan, Memaksimalkan hasil penangan sampah sudah terlaksana akan tetapi penanganan yang diberikan belum terlaksana secara merata sehingga banyak lokasi titik sampah yang belum ditangani. Selanjutnya untuk responden yang menjawab kurang terlaksana sebanyak 5 responden atau 13% dengan alasan, Memaksimalkan hasil penangan sampah belum terlaksana secara merata sehingga masih banyak sampah berserakan ditegah masyarakat.

Kemudian untuk item penilaian Evaluasi hasil penanganan sampah yang mana responden penelitian pada berdasarkan Pelaksanaan Tugas Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Indragiri Hilir Dalam Pengelolaan Sampah Di Kecamatan Tembilihan yang menyatakan terlaksana berjumlah 6 responden atau 15% dengan alasan, Evaluasi hasil penanganan sampah sudah dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kabupaten Indragiri Hilir bertujuan

memaksimalkan pencapaian pengelolaan sampah. Selanjutnya untuk responden yang menjawab cukup terlaksana sebanyak 24 responden atau 63% dengan alasan, Evaluasi hasil penanganan sampah sudah dilakukan akan tetapi pelaksanaan evaluasi terkait upaya penanganan sampah belum memberikan dampak perubahan melainkan masih mengalami kendala dan hambatan didalam penanganan sampah. . Selanjutnya untuk responden yang menjawab kurang terlaksana sebanyak 8 responden atau 21 % dengan alasan, Evaluasi hasil penanganan sampah belum memberikan hasil pencapaian penanganan sampah dengan maksimal sehingga masih ditemuinya sampah yang tidak pada tempatnya.

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa tanggapan atau jawaban responden penelitian mengenai Ketepatan melalui Pelaksanaan Tugas Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Indragiri Hilir Dalam Pengelolaan Sampah Di Kecamatan Tembilahan dalam katagori cukup terlaksana, kata gori cukup terlaksana dengan nilai responden 24 atau 64% dengan alasan, pencapaian pengelolaan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Indragiri Hilir dengan melakukan pelayanan pengangkutan sampah sampai ke tingkat RT, serta melakukan evaluasi terkait pencapaian penangan sampah akan tetapi terlihat belum memberikan dampak perubahan terkait memaksimalkan penanganan sampah ditegah masyarakat. Hal ini didapatkan dari hasil tanggapan responden yang menanyakan Ketepatan dalam Pelaksanaan Tugas Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Indragiri Hilir Dalam Pengelolaan Sampah Di Kecamatan Tembilahan melalui item penilaian Pelayanan pengakutan Sampah, Memaksimalkan hasil penangan sampah, Evaluasi hasil penanganan sampah.

Berikut hasil wawancara dengan Ibu Rahayu Ningsi sebagai Kepala Bidang Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Indragiri Hilir dalam pengelolaan sampah tanggal 9 September 2019 sebagai berikut :

“...Sejauh ini kami sudah memberikan pelayanan pengangkutan sampah mulai dari penyediaan bak sampah sampai dengan penyediaan mobil pengangkut sampah, dan bekerjasama dengan pihak ke 3, dan melakukan evaluasi terkait pelaksanaan pencapaian penanganan sampah....”

Berikut hasil wawancara dengan Bapak Novan Serwanto sebagai Kepala Seksi Penanganan dan Pemrosesan Akhir Sampah Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Indragiri Hilir dalam pengelolaan sampah tanggal 9 September 2019 sebagai berikut:

“....Pencapaian penanganan sampah yang kami lakukan ditegah masyarakat mengalami kendala meskipun telah dilakukan evaluasi terutama terkait penyediaan tambahan akutan sampah dan penyediaan Bak sampah serta petugas dilapangan sehingga kami masih mengalami keterbatasan didalam bekerja penanganan sampah ditegah masyarakat....”

Dari observasi yang penulis lakukan dapat diketahui bahwa pencapaian pengelolaan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Indragiri Hilir belum terlihat secara merata melakukan pelayanan pengangkutan sampah sampai ke tingkat pedalaman masyarakat melainkan jalan umum saja, sehingga belum memberikan dampak perubahan terkait memaksimalkan penanganan sampah ditegah masyarakat.

Berdasarkan hasil Kuesioner, wawancara dan Observasi penulis menganalisa bahwa Pelaksanaan Tugas Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Indragiri Hilir Dalam Pengelolaan Sampah Di Kecamatan Tembilahan bahwa pencapaian pengelolaan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan

Kabupaten Indragiri Hilir dengan melakukan pelayanan pengangkutan sampah sampai ke tingkat RT, serta melakukan evaluasi terkait pencapaian penanganan sampah akan tetapi terlihat belum memberikan dampak perubahan terkait memaksimalkan penanganan sampah ditegah masyarakat. Hal ini dapat diketahui melalui item penilaian Pelayanan pengangkutan Sampah, Memaksimalkan hasil penanganan sampah, Evaluasi hasil penanganan sampah dalam katagori cukup terlaksana.

Untuk mengetahui semua jawaban dari responden penelitian yang mana bertujuan untuk mengetahui jawaban dan tanggapan dari responden penelitian maka dibuatlah rekapitulasi jawaban responden penelitian yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel V.10. Rekapitulasi Jawaban Responden Tentang Evaluasi Pelaksanaan Tugas Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Indragiri Hilir Dalam Pengelolaan Sampah Di Kecamatan Tembilahan

No	Item Penilaian	Katagori Penilaian			Jumlah
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Kurang Terlaksana	
1	Efektivitas	7 (18%)	25 (66%)	6 (16%)	38
2	Efisiensi	5 (13%)	26 (66%)	7 (21%)	38
3	Kecukupan	9 (24%)	23 (60%)	6 (16%)	38
4	Perataan	9 (23%)	23 (61%)	6 (16%)	38
5	Responsivitas	9 (24%)	21 (55%)	8 (21%)	38
6	Ketepatan	7 (18%)	24 (64%)	7 (18%)	38
Jumlah		46	142	40	228
Rata-rata		8	24	6	38
Persentase		21%	63%	16%	100%

Sumber : Olahan Data Penelitian, 2019

Dari tabel rekapitulasi di atas terlihat bahwa responden Pelaksanaan Tugas Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Indragiri Hilir Dalam Pengelolaan Sampah Di Kecamatan Tembilahan untuk Efektivitas yang menjawab terlaksana 7 atau 18%, Selanjutnya untuk jawaban cukup terlaksana 25 atau 66%, dan responden yang menjawab kurang terlaksana sebanyak 6 atau 16%.

Untuk indikator kedua yaitu Efisiensi dalam Pelaksanaan Tugas Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Indragiri Hilir Dalam Pengelolaan Sampah Di Kecamatan Tembilahan yang menjawab terlaksana 5 responden atau 13%, selanjutnya untuk jawaban cukup terlaksana sebanyak 26 responden atau 66%, dan responden yang menjawab kurang terlaksana sebanyak 7 responden atau 21%.

Untuk indikator ketiga Kecukupan dalam Pelaksanaan Tugas Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Indragiri Hilir Dalam Pengelolaan Sampah Di Kecamatan Tembilahan yang menjawab terlaksana 9 responden atau 24%, selanjutnya untuk jawaban cukup terlaksana sebanyak 23 responden atau 60%, dan responden yang menjawab kurang terlaksana sebanyak 6 responden atau 16%.

Untuk indikator keempat Perataan dalam Pelaksanaan Tugas Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Indragiri Hilir Dalam Pengelolaan Sampah Di Kecamatan Tembilahan yang menjawab terlaksana 9 responden atau 24%, selanjutnya untuk jawaban cukup terlaksana sebanyak 23 responden atau 60%, dan responden yang menjawab kurang terlaksana sebanyak 6 responden atau 16%.

Untuk indikator kelima Responsivitas dalam Pelaksanaan Tugas Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Indragiri Hilir Dalam Pengelolaan Sampah Di Kecamatan Tembilahan yang menjawab terlaksana 9 responden atau 24%,

selanjutnya untuk jawaban cukup terlaksana sebanyak 21 responden atau 55%, dan responden yang menjawab kurang terlaksana sebanyak 8 responden atau 21%.

Untuk indikator keenam Ketepatan dalam Pelaksanaan Tugas Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Indragiri Hilir Dalam Pengelolaan Sampah Di Kecamatan Tembilahan yang menjawab terlaksana 7 responden atau 18%, selanjutnya untuk jawaban cukup terlaksana sebanyak 24 responden atau 64%, dan responden yang menjawab kurang terlaksana sebanyak 7 responden atau 18%.

Secara keseluruhan dari tabel diatas terlihat bahwa untuk responden yang menjawab terlaksana dengan rata-rata 8 orang atau persentase 21%, selanjutnya untuk responden yang menjawab cukup terlaksana dengan rata-rata 24 orang atau persentase 64%, selanjutnya untuk responden yang menjawab kurang terlaksana 6 orang atau 16%, sehingga dari tabel tersebut dapat dijelaskan bahwa Pelaksanaan Tugas Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Indragiri Hilir Dalam Pengelolaan Sampah Di Kecamatan Tembilahan sudah terlaksana dengan melaksanakan kebijakan didalam pengelolaan sampah mulai dari penanganan sampah di tengah masyarakat dengan penyediaan sarana prasarana seperti bak sampah dan akutan sampah serta memberikan pengarahan terkait upaya-upayah penanganan sampah serta melakukan kerjasama pegawai, atasan dan bawahan serta masyarakat dengan tujuan memaksimalkan pelaksanaan perturan di dalam implementasinya, sehingga dapat dikatakan Pelaksanaan Tugas Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Indragiri Hilir Dalam Pengelolaan Sampah Di Kecamatan Tembilahan cukup terlaksana, yang didapatkan dari keseluruhan jawaban responden yang menjawab dengan rata-rata 24 atau persentase 64%,

dengan melihat pengukuran yang telah penulis tentukan sebelumnya yaitu dalam rentang antara 34%-65% maka Pelaksanaan Tugas Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Indragiri Hilir Dalam Pengelolaan Sampah Di Kecamatan Tembilahan dalam katagori cukup terlaksana.

C. Hambatan Dalam Pelaksanaan Tugas Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Indragiri Hilir Dalam Pengelolaan Sampah Di Kecamatan Tembilahan

Adapun hambatan yang dapat penulis ketahui mengenai Pelaksanaan Tugas Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Indragiri Hilir Dalam Pengelolaan Sampah Di Kecamatan Tembilahan, meliputi :

1. Efektivitas

Efektivitas adalah pencapaian tujuan Pelaksanaan pengelolaan sampah diketahui belum dapat diterapkan berdasarkan peraturan pengelolaan sampah mulai dari waktu pengangkutan sampah sampai dengan penampungan sampah sesuai dengan waktu yang ditetapkan yaitu pengangkutan sampah 5 kali dalam seminggu melainkan dalam 3 kali dalam seminggu.

2. Efisiensi

Efisiensi yaitu usaha pencapaian hasil yang digunakan dengan penggunaan sumber daya dimana diketahui Dinas kebersihan belum melakukan penagwasan secara langsung agar sampah tidak dibuang masyarakat begitu saja, serta belum dilakukannya secara menyeluruh bagi masyarakat sosialisasi dan pengarahan akan tertibnya pembuangan sampah.

3. Kecukupan

Kecukupan yaitu kebijakan dalam pelaksanaan antara kerjasama kinerja organisasi dalam pencapaian tujuan, hal ini terlihat Dinas kebersihan bahwa belum adanya kerjasam yang solit atasan dan bawahan sehingga belum terlihat akan upaya instruksi atasa secara langsung terkait bentuk-bentuk dan upaya penanganan sampah mulai dari waktu pengkutan dari masyarakat sampai dengan penampungan akhir sampah.

4. Perataan

Perataan adalah pemberian pencapaian hasil kebijakan dimana diketahui bahwa belum mertanya bak sampah yang ditempatkan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Indragiri Hilir di setiap RT maupun persimpangan jalan umum sehingga banyak sampah yang masih berserakan dibuang tidak pada tempatnya.

5. Responsivitas

Responsivitas adalah kemampuan birokrasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat, didalam hal ini Dinas kebersihan belum menyediakan armada secukupnya didalam pengangkutan sampah sesuai dengan beban sampah yang ada dimana diketahui armada sebanyak 1 yang beroperasi sehingga menimbulkan penumpukan sampah.

6. Ketepatan

Ketepatan yaitu kepastian penerapan yang dilaksanakan dengan kegiatan yang terarah dalam hal ini terlihat Dinas Kebersihan belum melakukan pelayanan

pengangkutan sampah terhadap masyarakat secara merata sampai ke tingkat RT,
melainkan pada jalan umum saja



Dokumen ini adalah Arsip Milik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB VI

P E N U T U P

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan analisis data penelitian tentang Evaluasi Pelaksanaan Tugas Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Indragiri Hilir Dalam Pengelolaan Sampah Di Kecamatan Tembilahan melalui indikator
 - a. Efektivitas, pencapaian tujuan didalam pengelolaan sampah cukup terlaksana berdasarkan penetapan peraturan didalam pengelolaan sampah dengan pengangkutan 3 kali dalam seminggu.
 - b. Efisiensi, pencapaian hasil yang digunakan dengan penggunaan sumber daya dimana cukup terlaksana dimana petugas sudah melakukan sosialisasi peraturan sampah, pengangkutan sampah, dan pengawasan meskipun belum berlangsung dengan baik dikarenakan kurangnya jumlah petugas didalam penanganan pengelolaan sampah.
 - c. Kecukupan, pencapaian kerjasama kinerja organisasi didalam pengelolaan sampah bahwa belum dilakukannya pengawasan yang rutin ditegah masyarakat dan belum adanya akan pemberian himbauan akan tertibnya pembuangan sampah.
 - d. Perataan, pencapaian hasil kebijakan cukup terlaksana dengan penyediaan bak sampah dan pengankuta sampah akan tetapi dimana diketahui bahwa belum mertanya bak sampah disediakan di setiap RT maupun persimpangan jalan umum.

- e. Responsivitas, kemampuan birokrasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat cukup terlaksana, akan tetapi secara luas Dinas kebersihan belum menyediakan armada secukupnya didalam pengangkutan sampah armada sebanyak 1 yang beroperasi sehingga menimbulkan penumpukan sampah.
 - f. Ketepatan didalam kepastian penerapan yang dilaksanakan dengan kegiatan yang terarah cukup terlaksana dalam hal ini terlihat Dinas Kebersihan sudah melakukan pelayanan pengangkutan smpah akan tetapi terlihat pelayanan pengangkutan sampah belum secara merata sampai ke lokasih perumahan masyarakat, melainkan pada jalan umum.
2. Sementara hambatan dalam Pelaksanaan Tugas Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Indragiri Hilir Dalam Pengelolaan Sampah Di Kecamatan Tembilahan
- a. Efektivitas, pencapaian tujuan didalam pengelolaan sampah bahwa kurangnya jumlah pegawai dalam penangan sampah terutama petugas dilapangan.
 - b. Efisiensi, pencapaian hasil yang digunakan dengan penggunaan sumber daya belum terlaksananya pengelolaan sampah dengan baik mulai dari penyediaan bak sampah, hingga armada angkutan sampah serta belum dilakukannya sosialisasi secara merata akan larangan pembuangan sampah dengan sembarangan.

- c. Kecukupan, pencapaian kerjasama kinerja organisasi didalam pengelolaan sampah bahwa belum dilakukannya pengawasan yang rutin ditegah masyarakat dan belum adanya akan pemberian himbauan akan tertibnya pembuangan sampah.
- d. Perataan, pencapaian hasil kebijakan didalam pengelolaan sampah bahwa belum tersedianya penyediaan bak sampah di setia RT maupun persimpangan jalan umum sehingga sampai masih terlihat dibuang tidak pada tempatnya.
- e. Responsivitas, Dinas Kebersihan belum menyediakan armada secukupnya didalam pengangkutan sampah dimana diketahui jumlah armada yang beroperasi sebanyak 1 sehingga menimbulkan penumpukan sampah
- f. Ketepatan didalam kepastian penerapan pengelolaan sampah bahwa Dinas Kebersihan sudah belum melakukan pemberian sanksi yang tegas bagi masyarakat yang melakukan pembuangan sampah dengan sembarangan.

B. Saran

1. Hendaknya Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kabupaten Indragiri Hilir dalam Dalam Pengelolaan Sampah menambah jumlah petugas sampah mulai dari pengangkut serta pengawasan dimasyarakat
2. Perlunya kerjasama antara erat antara atasan dengan bawahan didalam pengelolan sampah.

3. Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kabupaten Indragiri Hilir hendaknya melakukan pengawasan secara rutin di tengah masyarakat agar sampah tidak dibuang sembarangan.
4. Hendaknya Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kabupaten Indragiri Hilir, menyediakan Armada pengangkutan sampah sesuai dengan beban sampah yang ada diketahui beroperasi sebanyak 1 armada perlu ditingkatkan sebanyak 2 armada.
5. Hendaknya Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kabupaten Indragiri Hilir memberikan sanksi bagi masyarakat yang melakukan pembuangan sampah dengan sembarangan tidak pada tempatnya.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

A. Buku-Buku

- Abidin, Said Zainal. 2002. *Kebijakan Publik Edisi Revisi*. Jakarta: Yayasan Pancur Siwan.
- Adisasmita, Rahardjo. 2011. *Pengelolaan Pendapatan Dan Anggaran Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Depdikbud. 2002. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Dunn, William, N. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi Kedua*. Yogyakarta: Gaja Mada University Komputindo.
- Dwidjowijoto, Riant Nugroho. 2008. *Analisis Kebijakan*. Jakarta. Elex Media Komputindo.
- Handoko, Hani. T. 2003. *Manajemen Edisi II Cetakan ke-18*. Yogyakarta: BPFE.
- Harsoyo, 1977, *Manajemen Kinerja*, Persada, Jakarta.
- Kuncoro, Sejati, 2009. *Pengelolaan Sampah Terpadu: Dengan Sistem Node Sub Point Center Point*. Yogyakarta: Kanisius.
- Labolo, Muhadam, 2007. *Kebijakan Publik*. Jakarta: Rieneka Cipta.
- Lubis, Solly. 2007. *Kebijakan Publik Mandar Maju*: Bandung.
- Manullang. 2006. *Dasar-Dasar Manajemen*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Munaf, Yusri. 2015. *Hukum administrasi Negara*. Pekanbaru, Marpoyan Tujuh.
- Musanef, 1982, *Sistem Pemerintahan di Indonesia*. Jakarta: Gunung Agung.
- Moleong J. Lexy. 2005. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Ndraha, Talizidhu. 2003. *Kybernologi (Ilmu Pemerintahan baru) 1*. Jakarta: Raneke Jaya.
- Ndraha, Talizidhu. 2003. *Kybernologi (Ilmu Pemerintahan Baru) 2*. Jakarta: Rineka Jaya.

- Nugroho, Riant. 2006. *Publik Policy: Teori Kebijakan-Analisis Kebijakan-Proses*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Nurcholis, Hanif. 2005. *Teori dan Praktik: Pemerintahan dan otonomi Daerah*. Jakarta: PT Garasindo.
- Panglaykim, 1991. *Manajemen, Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Ghalia Indonesia.
- Robbins. P.S. 2002, *Prinsip-Perinsip Prilaku Organisasi edisi Kelima*. Jakarta: Erlangga.
- Rasyid, M. Ryass. 1997. *Kajian Awal Birokrasi Pemerintahan Dan Politik Orde Baru*. Jakarta: Yarsif Watampone.
- Siagian. 2003. *Pengawasan dan pengendalian di Bidang Pemerintahan*. Jakarta: UI Press.
- Sugiono, 2003. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung, Alfabeta
- Subarsono. A.G.2009. *Analisis Kebijakan Publik Konsep Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sutarto, 2003, *Dasar-Dasar Organisasi*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
- Syafiie, inu Kencana. 2011. *Manajemen Pemerintahan*. Bandung: Rineka Cipta.
- Syafiie, Inu Kencana. 2005. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Bandung: Rafika Aditama.
- Tangkilisan, Hessel, Nogi S. 2003. *Kebijakan Publik yang Membumi*. Yogyakarta: Yayasan Pembaruan Dministrasi Publik Indonesia (YPAPI) & Lukman Offset.
- Wasistiono, Sadu, Dkk. 2009. *Perkenbangan Organisasi Kecamatan Dari Masa ke Masa*. Bandung: Fokus Media.
- Winarno. 2012. *Evaluasi Secara Sistematis*. Jakarta: PT. RajaGrapindo.
- Zulkifli, dkk. 2013. *Buku Pedoman Penulisan*. Pekanbaru: Badan Penerbit Fisipol UIR.

B. Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 20 tahun 2011 tentang pengelolaan sampah.

Peraturan Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 71 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Indragiri Hilir.

